



RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024

INDUSTRI ALAS KAKI NASIONAL



KATA PENGANTAR

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) telah memasuki periode ke-3 rencana strategis organisasi. Setelah melakukan proses transformasi organisasi di setiap periodenya, BPIPI berada pada masa take off sebagai organisasi layanan publik yang terus melakukan inovasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan RPJM Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan maka setiap unit kerja/satuan kerja diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis jangka waktu 5 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) menyusun Rencana Strategis untuk menangkap peluang perubahan yang terjadi pada sektor manufaktur industri alas kaki khususnya IKM. Ragam perubahan media teknologi dan informasi menjadikan peta industri alas kaki mengalami pergeseran. IKM alas kaki saat ini harus punya orientasi penggunaan internet of Things (IoT) pada setiap rantai nilai bisnisnya. Perubahan ini menjawab tantangan ke depan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian yang telah menyusun inisiasi "Making Indonesia 4.0" sebagai implementasi peta jalan Indonesia menuju revolusi industri 4.0.

Dalam dokumen rencana strategi (renstra) BPIPI periode 2020- 2024 ini terdapat beberapa tema yang menjadi variabel perubahan dalam indikator kinerja organisasi dalam periode akhir 2019 termasuk rencana aksi dalam yang mendukung agenda reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Beberapa tema perubahan pada periode akhir renstra BPIPI 2015-2019 yang masih relevan menjadi kunci perubahan pada periode 2020 – 2024 ini adalah sebagai berikut:

- Perkembangan teknologi dan media informasi
- Pergeseran ekonomi manufaktur menuju jasa
- Revolusi industry 4.0
- Bonus demografi Indonesia

Dalam kesempatan penyusunan dokumen rencana strategis ini adalah momentum yang tepat untuk mendapatkan masukan lebih komprehensif tentang beberapa isu utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Peemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) periode 2020 – 2024 sebagai acuan kegiatan dan pemberdayaan organisasi. Harapan kami renstra ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BPIPI

Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) periode 2020 – 2024 sebagai acuan kegiatan dan Pemberdayaan organisasi. Kepada semua pihak, baik dari komponen yang ada dilingkungan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia yang terlibat maupun yang memberikan masukan dalam proses penyusunan perubahan dokumen, kami mengucapkan terima kasih. Harapan kami Renstra ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

Sidoarjo, Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan
Indonesia



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA
BALAI BPIPI
NOMOR. 2 TAHUN /2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PEMBERDAYAAN
INDSUTRI PERSEPATUAN
INDONESIA TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum (1)
- B. Capaian Kinerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan indonesia Tahun 2015-2019 (13)
- C. Potensi dan Permasalahan (28)
 - 1. Potensi
 - 2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi (47)
- B. Misi (47)
- C. Tujuan (49)
- D. Sasaran Strategis (50)
 - 1. Stakeholders Prespective
 - 2. Customer Perspective
 - 3. Internal Process Perspective
 - 4. Learning and GrowthPerspective

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan Penumbuhan dan Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah, danAneka (56)

- B. Strategi Penumbuhan dan Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (68)
 - 1. Strategi Penumbuhan dan Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
 - 2. Sasaran Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
 - 3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
- C. Kerangka Kelembagaan (73)

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja (78)
- B. Kerangka Pendanaan (79)

BAB V PENUTUP (80)

DAFTAR PUSTAKA (81)

LAMPIRAN (84)

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Capaian Rencana Strategis BPIPI (14)
- Tabel 1.2 Alur Indikator Kinerja BPIPI tahun Renstra 2015 – 2019 (18)
- Tabel 1.3 Alokasi Anggaran BPIPI dari tahun ke tahun (25)
- Tabel 1.4 Penerimaan PNBP dari tahun ke tahun (26)
- Tabel 1.5 Profil SDM berdasarkan Jabata (35)
- Tabel 1.6 Profil SDM berdasarkan Pendidikan (36)
- Tabel 1.7 Proyeksi penduduk Indonesia hingga tahun 20 (38)
- Tabel 2.1 Indikator Tujuan Organisasi (49)
- Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BPIPI (50)
- Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPIPI (50)
- Tabel 3.1 Strategi Kebijakan Periode 2020 – 2024 (75)
- Tabel 4.2 Kerangka Anggaran 2020 – 2021 (79)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Grafik Realisasi Anggaran (25)
- Gambar 1.2 Penerimaan PNBP dari tahun ketahun (26)
- Gambar 1.3 Persentase Penerimaan PNBP setiap jasa layanan (26)
- Gambar 3.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju (57)
- Gambar 3.2 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional (58)
- Gambar 3.3 Kerangka Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 (58)
- Gambar 3.4 Gambaran Pertumbuhan 2020 – 2024 (59)
- Gambar 3.5 Isu Strategis Prioritas Nasional (54)
- Gambar 3.6 Prioritas Nasional PN 1 (60)
- Gambar 3.7 Indikator dan Target Pembangunan Industri industri dalam RPJMN 2020 – 2024 (61)
- Gambar 3.8 Indikator dan Target Pembangunan Industri dalam RPJMN 2020 – 2024 (62)
- Gambar 3.9 Program Prioritas :Peningkatan Nilai Tambah , Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (63)
- Gambar 3.10 Indikator dan target Pembangunan Industri dalam RPJMN 2020 – 2024 (64)
- Gambar 3.11 Kegiatan- kegiatan Prioritas dalam Prioritas 5 (PP 5) (64)
- Gambar 3.12 Kegiatan – kegiatan Prioritas dalam Program Prioritas 6. (65)
- Gambar 3.13 Kegiatan – kegiatan Prioritas dalam Prioritas 7 (65)
- Gambar 3.14 Kegiatan – kegiatan Prioritas dalam program Prioritas 8 (66)
- Gambar 3.15 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas (66)
- Gambar 3.16 Aspirasi Making Indonesia 4.0 (67)
- Gambar 3.17 Struktur Organisasi BPIPI (73)

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan. secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Fokus Pemberdayaan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:
 - a. Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
 - b. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksiglobal;
 - c. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
 - d. Mendesain ulang zona industri nasional; dan
 - e. Pemberdayaan IKM melalui dukungan Pemberdayaan kompetensi internal,

Pemberdayaan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

2. Penguasaan Teknologi

- a. Pembentukan ekosistem inovasi melalui Pemberdayaan pusat- pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- b. Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- c. Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- d. Pemberdayaan Industri Hijau.

3. Peningkatan Kualitas SDM

- a. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- b. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- c. Pembangunan dan Pemberdayaan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi

BPIPI sudah menjalani 3 (tiga) periode rencana strategis Kementerian Perindustrian. Sejak tahun 2009, BPIPI disetujui menjadi satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah merupakan periode awal masuk rencana strategi 2010 – 2014. Kemudian masuk pada periode ke-2 tahun 2015 – 2019 yang baru saja dilewati untuk masuk pada periode ke-3 tahun 2020 – 2024 yang merupakan babak baru BPIPI memasuki era disrupsi digital dimana inovasi menjadi agenda utama organisasi.

Fenomena revolusi industri 4.0, cepat atau lambat secara alamiah akan menjalar di sektor alas kaki, khususnya IKM. BPIPI melihat dalam periode 5 tahun terakhir tumbuh *start up* baru meskipun dengan jumlah yang belum berarti muncul IKM alas kaki berbasis *IoT (Internet Of Things)*. *IoT* muncul sebagai konsekuensi dari fenomena revolusi industry 4.0. Penggunaan teknologi, media informasi dan media sosial semakin memberikan banyak pilihan bagi IKM untuk melakukan inovasi dan transformasi pada proses bisnis. Fenomena *IoT* juga berdampak pada sisi konsumen, beberapa perubahan antara lain, adanya kecenderungan konsumen untuk belanja melalui media *online* sudah menunjukkan aktifitas yang tidak sedikit terutama generasi milenial. Praktek *business as usual* mulai tergerus perlahan, toko-toko konvensional mulai membuka diri dengan media *online* untuk memperluas jangkauan pasarnya.

Internet of things sangat erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0. *IoT* berguna untuk

mencari dan mengumpulkan data yang kemudian akan di olah menjadi informasi yang lebih bermanfaat. IoT di industri alas kaki sebagai penghubung antara mesin produksi agar berjalan lebih efisien, Dan dapat pula dimanfaatkan pada sisi inventori, marketing dan penjualan yang tidak luput dari disrupsi revolusi industri 4.0. Perubahan tidak hanya sedang terjadi pada industri skala besar, Kementerian Perindustrian juga mendorong industri skala menengah kecil agar ikut menangkap peluang perubahan di era industri 4.0.

Dalam meningkatkan integritas organisasi, BPIPI secara khusus menginisiasi program BPIPI *to the next level*. Program ini didorong sebagai komitmen bentuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam jangka menengah 2020- 2024, program BPIPI *to the next level* secara bertahap akan implementasikan sebagai budaya organisasi yang secara konsisten meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan paradigma baru, BPIPI sebagai organisasi yang melayani dan lebih dekat ke masyarakat, kedepannya akan mengoptimalkan berbagai media dan infrastruktur teknologi sebagai media komunikasi dan *platform* baru bagaimana BPIPI melayani masyarakat industri dengan lebih baik, transparan, profesional dan menegakkan integritas.

Dalam upaya BPIPI menuju era industri 4.0, BPIPI akan mengembangkan beberapa *pilot project* Alas Kaki 4.0 yang fokus pada pendampingan industri menengah alas kaki yang mengimplementasikan secara bertahap industri 4.0. Konsep *fabrication laboratory (fablab)* yang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas kreatif, inkubator teknologi, penggerak media sosial (*influencer*) yang mempunyai *concern* yang sama kepada penumbuhan *start up* industri alas kaki di masa depan. Beberapa tema perubahan pada akhir periode akhir renstra BPIPI 2015-2019 antara lain :

- Perkembangan teknologi dan media informasi yang merubah paradigma konsumen dalam memandang sebuah produk berubah dari yang semula berorientasi pada transaksi semata menjadi transaksi yang berorientasi pada pengalaman dan hal baru dalam menggunakan produk. Saat ini *customer experience* menjadi sangat penting bagi produsen, sehingga banyak dari manufaktur mendefinisikan kembali produk mereka sebelum dilepas ke pasar. Tidak hanya industri skala menengah besar, pada skala kecil pun mulai berubah cara pandang bagaimana berlomba membuat produk dengan *feature-feature* tambahan yang membuat konsumen lebih merasakan ada manfaat lain dari produk tersebut. Dan *feature* tersebut banyak didapatkan industri manufaktur

dengan memanfaatkan teknologi dan media informasi. Pada industri alas kaki, baik skala kecil dan menengah, perlu diintervensi dengan kebijakan kemudahan penggunaan teknologi dan media informasi baik dari segi infrastruktur dan biaya penggunaannya.

- Pergeseran ekonomi manufaktur menuju jasa tidak terelakan lagi. Turunnya kontribusi industri manufaktur pada PDB nasional menjadi indikator utama. Di sisi lain, bonus demografi Indonesia pada tahun 2030 akan ada populasi usia produktif sebesar 30 juta, di mana bisa menjadi beban jika industri tidak mampu menyerap optimal tenaga kerja produktif tersebut. Namun, bonus demografi tersebut akan berlaku jika intervensi kebijakan ekonomi nasional mampu memberikan peluang pada tenaga kerja usia produktif untuk diserap optimal oleh industri domestik, khususnya IKM alas kaki.
- Fenomena *The Industry 4.0* sudah di depan para pelaku industri nasional. Akan terjadi perubahan mendasar pada struktur industri nasional, dan saat ini 4IR sudah menjadi agenda nasional dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Indonesia adalah salah satu pasar ekonomi terkuat di dunia dengan jumlah populasi yang mendekati 270 juta. Semua kekuatan ekonomi global tertuju ke Indonesia sebagai pasar yang melimpah, juga sebagai sumber tenaga kerja produktif yang kompetitif. Dengan kontribusi serapan tenaga kerja hingga 14 juta dan belanja konsumen nasional yang kuat ke depan, Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang merubah dari berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sektor yang bernilai tambah.

Periode rencana strategis BPPI periode 2020 – 2024 mempunyai beragam tantangan. Tantangan digitalisasi, pertumbuhan dan budaya baru milenial, dan pandemi covid-19 sangat mempengaruhi bagaimana BPPI ke depan memberikan pelayanan kepada masyarakat industri. Tahun 2022, awal kebangkitan industri yang juga sangat relevan dengan kinerja organisasi Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI). Awal kebangkitan industri alas kaki yang sebelumnya mengalami keterperpurukan akibat pandemic Covid – 19 dan sekaligus momentum perubahan organisasi BPPI menjadi Balai Pemberdayaan yang mempunyai visi lebih luas serta fokus pada penumbuhan dan kebangkitan industri alas kaki di Indonesia. Berbagai terobosan inovasi layanan publik bertahap akan diarahkan pada basis manfaat (*outcome*) sehingga langsung dirasakan dampaknya oleh industri, khususnya IKM alas kaki.

Dalam penyusunan dokumen rencana strategi BPIPI periode 2020 – 2024 harus selaras pada amanah Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Dokumen rencana strategis BPIPI periode 2020 – 2024 merupakan turunan dari rencana strategis Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian yang mengacu pada rencana strategis Kementerian Perindustrian sebagai payung hukum implementasi layanan BPIPI kepada masyarakat industri khususnya IKM alas kaki.

Dalam era disrupsi saat ini, banyak terjadi perubahan sistem dan tatanan bisnis yang menuntut kita semua melakukan inovasi sekaligus terobosan baru dalam berbisnis. Disrupsi juga menuntut perubahan budaya secara fundamental yakni disrupsi digital, disrupsi melennial dan disrupsi pandemi. Ketiganya menggerus cara-cara konvensional dan menggantinya dengan tatanan baru yang lebih inovatif, dinamis sekaligus membuat kolaborasi dan kemitraan menjadi sangat relevan saat ini dari pada kompetisi itu sendiri.

Dalam situasi pandemi tahun 2021 yang masih dapat dirasakan dampaknya oleh industri alas kaki khususnya IKM diperlukan sebuah gerakan kebersamaan pelaku industri alas kaki di Indonesia. Gerakan dengan semangat saling mendukung dan bekerja sama agar industri alas kaki nasional mampu melewati masa pandemi covid19 bersama. Sebagai bagian terintegrasi dari kampanye nasional #BanggaBuatanIndonesia yang diluncurkan Presiden Jokowi pada bulan Mei 2020. Kampanye ini bertujuan mendorong masyarakat untuk membeli produk-produk buatan IKM lokal, untuk mendukung keberlangsungan sektor industri itu selama pandemi. Sebagai bagian dari gerakan gotong royong seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bangga, cinta, dan membeli produk Indonesia, terutama produk lokal yang dihasilkan IKM.

Sebagai salah satu manufaktur alas kaki terbesar ke-4 secara global, BPIPI merasa perlu mengambil inisiatif mengambil peran untuk mengintegrasikan informasi produsen, supplier, sumber material, merk lokal dan organisasi yang bergerak di sektor industri alas kaki. Ekspansi industri manufaktur semakin meningkat ditengah pandemi seperti saat ini. Hal tersebut terlihat dari kinerja sektor manufaktur yang semakin membaik , seperti PDB, realisasi

investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja dan *purchasing manager's index* (PMI) manufaktur.

Berdasarkan data dari BPS, kinerja ekspor impor industri alas kaki menunjukkan sinyal positif. Tahun 2022 kuartal 3, ekspor alas kaki sebesar USD 5,949 milyar atau naik dibanding tahun 2021 kuartal 3 (USD 4,388 milyar). Sedangkan tahun 2022 kuartal 3, impor alas kaki sebesar USD 758 juta atau naik dibandingkan tahun 2021 kuartal 3 (USD 511 juta). Meskipun ada potensi resesi, tahun 2022 kuartal 3 neraca perdagangan industri alas kaki surplus sebesar USD 5,191 milyar.

Hal tersebut menunjukkan indikasi pondasi pemulihan ekonomi terus menunjukkan pertumbuhan, walaupun tidak dapat dipungkiri penurunan output akibat permintaan masih sangat berkurang sebagai dampak resesi dan pandemi. Indikator positif lainnya adalah capaian ekspor industri alas kaki nasional juga sangat positif.

Beberapa peran penting BPIPI dalam ekosistem industri alas kaki khususnya IKM adalah bagaimana Pemberdayaan produk, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sentra, penguatan industri 4.0, kreatifitas, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran, penumbuhan dan Pemberdayaan wirausaha serta penguatan hubungan kemitraan mampu meningkatkan memperkuat peran IKM alas kaki dalam ekosistem industri alas kaki salah satunya memperkuat industri skala besar. Semua tugas dan fungsi tersebut telah selaras dengan tugas dan fungsi direktorat jenderal IKM Kementerian Perindustrian.

Peran BPIPI ke depan semakin menantang. Penumbuhan industri alas kaki semakin banyak dan semakin tumbuh. Sehingga kapasitas dan kapabilitas BPIPI harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kedepan tugas penting BPIPI terkait fasilitasi kemitraan BPIPI mempunyai peluang yang semakin besar. Dengan mengadaptasi model kolaborasi yang sudah, pola tersebut perlu ditularkan kepada IKM alas kaki potensial yang lain. Harapannya dapat meningkatkan kemampuan produksi yang berorientasi ekspor, menguatkan kemitraan sekaligus menaikkan konsumsi dalam negeri.

Era disrupsi digital, milenial dan pandemi ini salah satu aspek yang harus ditingkatkan penggunaannya adalah internet dan media sosial untuk percepatan akses pasar. Aspek ini bisa memberikan dampak langsung pada meningkatkannya kemampuan usaha. Dengan melihat potensi tersebut industri alas kaki yang mempunyai kemampuan berbeda tetap harus di dorong optimalisasi pemanfaatan internet dan sosial media bagi IKM khususnya alas kaki

lebih optimal. Supaya manfaat langsung penggunaan platform multimedia ini bisa meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang termasuk inovasi dan kreatifitas IKM.

Transformasi digital dan inovasi berkelanjutan menjadi agenda penting saat pandemi. Bergesernya perilaku industri dan konsumen memberikan dampak perubahan yang signifikan pada perubahan industri khususnya alas kaki. Agenda percepatan digital, transformasi bisnis dan fenomena-fenomena yang muncul saat pandemi memberikan peluang dan tantangan baru dalam industri alas kaki salah satunya adalah semangat kolaborasi. Perubahan dan fenomena pandemi mendorong industri khususnya sektor alas kaki melakukan beberapa penyesuaian antara lain membangun platform digital bersama. Pesatnya perkembangan platform digital didorong oleh perubahan perilaku pasar atau konsumen yang cenderung *low mobility, less crowd dan low touch*.

Industri alas kaki khususnya IKM termasuk sektor dengan mobilitas (*high mobility*) dan kontak fisik yang tinggi (*high touch*). Saat pandemi IKM alas kaki harus mengurangi mobilitas manufakturnya agar risiko pandemi bisa di kendalikan, dan produksi tetap berjalan. Interaksi dengan konsumen selama pandemi berubah drastis. IKM alas kaki dituntut mengembangkan fitur alternatif bagi konsumen untuk melakukan interaksi melalui platform digital yang tersedia. Salah satu fenomena penting yang saat ini semakin menguat adalah semangat kolaborasi. Terganggunya *supply chain* secara global pada tahun pertama pandemi berdampak pada tumbuhnya ekosistem rantai nilai industri lokal, sehingga ketergantungan bahan impor dapat dikurangi dengan saling memberikan dukungan sesama pelaku industri untuk tetap melakukan produksi.

Lahirnya optimisme saat pandemi dan munculnya semangat lokalisme di komunitas merk-merk lokal memberikan harapan baru bangkitnya industri alas kaki nasional. Optimisme dan semangat tersebut BPIPI hadirkan dalam rangkaian gerakan #IndonesiaMelangkah sebagai wujud Komitmen Kecintaan dan Kebersamaan dalam mendukung karya anak bangsa.

Agenda digitalisasi layanan menjadi prioritas dalam periode rencana strategis BPIPI 2020 – 2024. Agenda ini menjawab tantangan arahan Presiden Republik Indonesia dengan kebijakan “Making Indonesia 4.0” sebagai implementasi peta jalan Indonesia menuju revolusi industri 4.0 dimana Kementerian Perindustrian menjadi motor utamanya. Teknologi Augmented Reality, (AR), Artificial Intellegent (AI) dan Internet of things (IoT) yang sangat erat

kaitannya dengan industri 4.0 menjadi agenda jangka panjang BPIPI. Dan dalam implementasi tugas dan fungsinya BPIPI akan mendorong industri skala menengah dan kecil agar ikut menangkap peluang di era industri 4.0.

Dengan agenda digitalisasi, BPIPI juga menargetkan peningkatan integritas dan layanan organisasi. Agenda besar digitalisasi ini didorong sebagai bentuk komitmen dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. BPIPI sebagai organisasi layanan publik, kedepannya akan terus mengoptimalkan berbagai media dan infrastruktur teknologi sebagai platform digital yang menawarkan pengalaman baru bagaimana BPIPI melayani masyarakat industri dengan lebih baik, transparan, profesional dan menegakkan integritas. Dalam upaya BPIPI menuju era industri 4.0, BPIPI akan mengembangkan konsep *fabrication laboratory (fablab)* yang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas kreatif, inkubator teknologi, media sosial dan yang mempunyai concern yang sama kepada penumbuhan start up industri alas kaki.

Kembali kepada substansi tugas dan fungsi, BPIPI di tahun 2022 perlu menyiapkan agenda percepatan dan penyelerasan tugas dan fungsi dalam rangka reformasi birokrasi. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika industri khususnya IKM alas kaki, maka Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) akan menjadi bagian penting dari Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian dalam mendorong mewujudkan daya saing, penguatan struktur industri, peningkatan kreativitas, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan industri menengah alas kaki dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, dan industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan industri menengah alas kaki dengan sektor ekonomi lainnya berlandaskan keunggulan potensi daerah dan pendalaman struktur industri.

Hal tersebut penting dan menjadi prioritas karena menjadi peran penting BPIPI dalam menguatkan kemitraan IKM alas kaki adalah terletak pada fungsi pendampingan yang terintegrasi. Dimulai dari Pemberdayaan produk, peningkatan kreativitas dan inovasi, penumbuhan dan Pemberdayaan wirausaha maupun sentra IKM termasuk pada generasi muda agar tertarik pada potensi industri alas kaki, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran melalui digitalisasi/*e-business*, penguatan industri 4.0, serta penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan industri menengah alas kaki. Peran kunci ini akan terus

didorong BPIPI menghasilkan IKM alas kaki dengan kemampuan usaha yang lebih besar (*scale up*) sehingga IKM alas kaki mampu naik kelas dan semakin banyak lagi tumbuh wirausaha-wirausaha baru di bidang alas kaki.

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) sebagai unit pelayanan teknis yang menangani pemberdayaan industri persepatuan di Indonesia, memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan industri nasional di bidang alas kaki melalui media kreatif dan fesyen alas kaki di Indonesia. Dengan melaksanakan tugas tersebut maka diharapkan akan berkembang industri kreatif alas kaki sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan mendorong percepatan pembangunan industri nasional.

Di samping tugas pembangunan yaitu mendorong tumbuhnya industri kreatif alas kaki nasional, BPIPI secara internal mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan diri melalui peningkatan kompetensi SDM serta memberikan jasa layanan teknis kepada industri kecil, menengah dan besar. Semua hal tersebut dalam upaya peningkatan kompetensi balai yang merupakan inti dan dapat meningkatkan peran BPIPI dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dengan meningkatkan jasa pelayanan teknis yang diberikan.

Tema terkini yang akan di prioritaskan oleh BPIPI pada periode renstra 2020 – 2024 BPIPI fokus pada kepercayaan masyarakat, stakeholder, dan industri untuk memberikan pelayanan prima, zero complain dan menjadikan BPIPI unggul dan profesional. Dengan motto SALAM SEPATU Semangat – Cepat – Jitu BPIPI bercita-cita menjadi organisasi layanan publik dengan inovasi yang berkelanjutan, administrasi dan birokrasi yang sederhana, operasional dan pelayanan yang cepat, tepat, akuntabel, informatif, akurat, terpercaya dan mudah diakses. Hal ini semata-mata mewujudkan percepatan program reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good & clean governance*).

Keberlangsungan implementasi Reformasi Birokrasi BPIPI memiliki peran vital dalam mewujudkan BPIPI yang profesional dan berintegritas sesuai harapan masyarakat dan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan dan evaluasi program Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Cetak Biru (Road Map) Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2021 BPIPI meraih predikat WBBM (wliayah Birokrasi Bersih dan Melayani), ini sebuah komitmen besar BPIPI untuk terus

memperbaiki layanan kepada industri. Tahun 2020 hingga sekarang tahun 2022, BPIPI telah bertransformasi sesuai arahan Grand Plan Reformasi Birokrasi sebagai *performance based bureaucracy* dengan 3 (tiga) ciri utama yakni:

1. Sebagai unit layanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis
2. Sebagai unit layanan publik yang fokus pada upaya mewujudkan hasil (outcome)
3. Sebagai unit layanan publik yang fokus menerapkan manajemen kinerja yang didukung oleh penerapan sistem layanan berbasis elektronik.
4. Sebagai unit layanan publik dimana setiap personelnnya mempunyai kontribusi yang jelas dan terukur pada kinerja organisasi.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita – cita organisasi. Tujuan Berdasarkan Sasaran pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015 – 2019 yang terkait dengan Kementerian Perindustrian penumbuhan sector industri menjadi dominan Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan tujuan rencana Strategis BPIPI 2015 – 2019 bahwa indikator tujuan utama adalah sebagai berikut :

“Kontribusi pertumbuhan IKM persepatuan terhadap IKM keseluruhan di Indonesia

Dengan indicator kinerja :

1. Target pertumbuhan alas kaki hingga tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah 0,0020%.
Sampai dengan tahun 2019
2. Kenaikan rata – rata ekspor alas kaki dari tahun 2015 – 2019 adalah 1,5%

Target pertumbuhan hingga tahun 2019 adalah 0,0020% dan hingga tahun 2019 Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia berkontribusi pada penumbuhan industri sebanyak 0,0025 dari target pencapaian Dirjen IKMA. Nilai ini lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan BPIPI. Pengambilan data indikator ini berdasarkan penumbuhan wirausaha baru industri alas kaki tahun 2015 – 2019 yang dikumpulkan oleh BPIPI berdasarkan legalitas usaha yang dimiliki IKM tersebut sebagai binaan BPIPI.

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia dalam penjabaran kegiatan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian dan Sekretaris Direktorat Jendral IKMA yang kemudian diwujudkan dalam perjanjian kinerja BPIPI tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan indikator kinerja pada IKU dan perjanjian kinerja organisasi sebagai langkah organisasi sebagai tujuan dalam mewujudkan tujuan organisasi

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

Tabel 1.1 Capaian Rencana Strategis BPIPI

| Kode SS | Sasaran Strategis (SS) | Penjelasan SS | Kode IKSS | Indikator kinerja sasaran Strategis | Penjelasan IKSS | Satuan | Target Total | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian tahun |
|--|--|--|-----------|--|--|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | | | | | Target | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,0 |
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | Penumbuhan wirausaha baru | Menumbuhkan wirausaha baru sektor alas kaki | S1.1 | Jumlah wirausaha industri kecil yang mendapatkan program | Jumlah wirausaha IKM yang potensial yang mendapat program Pemberdayaan usaha | IKM | 20 | 20 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 1000,0 |
| | | | S1.2 | Jumlah wirausaha industri kecil baru | Jumlah WUB yang memperoleh ijin usaha | IKM | 145 | 20 | 20 | 25 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 13 | 30 | 81,4 |
| PERSPEKTIF PROSES INTERNAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T1 | Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan serta Konsultan Industri Kecil dan Menengah | Peningkatan kemampuan sentra, UPT, TPL Konsultan untuk fasilitator IKM alas kaki | T1.1 | Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan | Jumlah TPL yang mendapat bimtek dan sertifikasi | TPL | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 0 | - | 100,0 |
| | | | T1.2 | Jumlah Konsultan IKM tenaga Kerja | Jumlah Konsultan yang mendapat bimtek dan sertifikasi | Konsultan | 15 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 100,0 |
| T2 | Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait | Peningkatan kerjasama dengan Lembaga pendidikan, penelitian, asosiasi dalam bidang alas kaki | T2.1 | Penyerapan Jumlah tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja yang terserap di industri | TK | 4900 | 200 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2391 | 181,4 |
| | | | T2.2 | Jumlah Kerjasama | Jumlah kerja sama bidang alas kaki | KS | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 226,7 |
| | | | T2.3 | Lembaga sertifikasi persnel | pendirian LSP untuk fasilitasi uji kompetensi alas kaki | LSP P1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 100,0 |
| | | | T2.4 | Perluasan ruang lingkup LSP | perluasan lingkup LSP sesuai kebutuhan dunia industri | RL | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | 160,0 |
| T3 | Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi Kompetensi | peningkatan SDM alas kaki yang bersertifikat kompetensi | T3.1 | Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang memperoleh sertifikat | jumlah IKM/TK yang tersertifikasi dan dinyatakan kompeten dibidangnya | Orang | 4900 | 200 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 1500 | 1498 | 1498 | 2391 | 181,4 |
| T4 | Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis | Pemberian Bimtek alas kaki untuk peningkatan SDM alas kaki | T4.1 | Jumlah IKM yang mendapat pelatihan | Jumlah IKM mendapat bimtek alas kaki untuk peningkatan SDM alas kaki | IKM | 780 | 300 | 240 | 240 | - | - | 340 | 260 | 240 | 0 | - | 107,7 |
| T5 | Peningkatan Pemberdayaan produk | peningkatan Pemberdayaan produk alas kaki secara desain, teknologi | T5.1 | Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki | Karya desain alas kaki yang tercipta dari anak bangsa | Karya | 1080 | 300 | 400 | 380 | - | - | 571 | 423 | 435 | 0 | - | 132,3 |
| | | | T5.2 | Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Fotografi Alas Kaki Nasional | Karya fotografi alas kaki yang tercipta dari anak bangsa | Karya | 1400 | - | 300 | 380 | - | - | - | 522 | 515 | 0 | - | 103,4 |
| | | | T5.4 | Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Videografi Alas Kaki Nasional | Karya Videografi alas kaki yang tercipta dari anak bangsa | Karya | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | 38 | - | - | 152,0 |
| | | | T5.5 | Jumlah Prototype | Prototype hasil Pemberdayaan dan perekayasaaan | Karya | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 24 | 24 | 0 | - | 113,3 |
| | | | T5.6 | Jumlah prototype yang diproduksi IKM | hasil Pemberdayaan alas kaki BPIPI yang diproduksi oleh IKM | Prototype | 11 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | - | 3 | 6 | 7 | 145,5 |
| T6 | Peningkatan Segmen dan Peluasan Pasar | peningkatan promosi IKM | T6.1 | Jumlah IKM yang difasilitasi ikut pameran | jumlah IKM yang difasilitasi kegiatan promosi | IKM | 60 | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | 0 | - | 100,0 |
| | | | T6.2 | Jumlah Media Promosi | jumlah IKM yang difasilitasi kegiatan promosi | Paket | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 122,0 |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai PEMBERDAYAAN Industri Persepatuan Indonesia

| e SS | Sasaran Strategis (SS) | Penjelasan SS | Kode IKSS | Indikator kinerja sasaran Strategis | Penjelasan IKSS | Satuan | Target Total | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian tahun | |
|---|---|--|-----------|--|---|----------|--------------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Target | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.1 | SDM yang kompeten | SDM ASN di lingkungan BPIPI yang mengikuti diklat dan pejabat yang mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan dan sertifikasi kompetensi | L.1.1 | Jumlah SDM yang Kompeten | Jumlah SDM yang tersertifikasi kompetensi | SDM | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 3 | 0 | - | 145,0 | |
| L.2 | Sistem informasi yang andal | sistem informasi yang dimiliki oleh BPIPI dalam rangka keterbukaan informasi | L.2.1 | Jumlah aplikasi Sistem informasi yang dikembangkan | Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pelayanan publik | Paket | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 100,0 | |
| | | | | Jumlah member sistem informasi BPIPI | Jumlah member sistem informasi BPIPI | orang | 700 | - | - | 700 | - | - | - | 1514 | - | 150,1 | | | |
| | | | | Jumlah member sistem informasi BPIPI | Jumlah member sistem informasi BPIPI | % | min 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | 18,69 | - | 93,5 | | |
| L.3 | Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas | tercapainya target dibidang perencanaan akuntabilitas kinerja di BPIPI | L.3.1 | Tingkat kesesuaian Rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan | tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan realisasi | persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | 90 | 90 | 100 | 100 | - | 95,0 | |
| | | | L.3.2 | Tingkat penyerapan anggaran | persentase realisasi pelaksanaan anggaran BPIPI dengan pagu yang ditetapkan | persen | 95 | 95 | 95 | 93 | 95 | 97 | 96,78 | 98,91 | 97,22 | 98,01 | 98,24 | 97,7 | |
| L.5 | Sistem Pengendalian internal yang efektif | Terciptanya sistem pengendalian yang efektif dan efisien | L.5.1 | Temuan Audit Eksternal | temuan ketidaksesuaian audit eksternal | LK mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| | | | L.5.2 | Jumlah LHU yang | jumlah LHU yang diterbitkan | LHU | 580 | 200 | 200 | 180 | - | - | 250 | 187 | 196 | 0 | 0 | 0 | 109,1 |
| | | | L.5.3 | Level kepuasan pelanggan | indeks kepuasan pelanggan dalam melayani pelayanan publik | nilai | B | B | B | A | B | B | B | B | A | B | B | 0 | 100,0 |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan masyarakat dalam skala angka | Nilai | - | - | - | - | 3,3 | 3,4 | - | - | - | 3,42 | 3,58 | 103,6 | |
| | Tingkat maturitas | Nilai SPIP | nilai | 3,3 | - | - | 3,2 | 3,3 | 3,4 | - | - | 3,6 | 3,66 | 3,82 | 110,9 | | | | |
| L.6 | Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran | Monitoring akuntabilitas yang kontinue | L.6.1 | Nilai SAKIP BPIPI | penilaian sistem akuntabilitas BPIPI | Nilai | 75 | 70 | 60 | 75 | 75 | 75 | 70 | 60,22 | 85,18 | 90,91 | 81,33 | 100,0 | |

Capaian kinerja hingga periode terakhir rencana strategis tahun 2015 – 2019 yang tidak terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah wirausaha baru baru mencapai 81,4% dari total target jangka menengah sebanyak 145 IKM. Hingga akhir periode jangka menengah Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. Realisasi indikator IKM yang mendapat ijin usaha hanya 118 IKM dari total 145 yang ditargetkan BPIPI. Hal ini disebabkan kurang kesadaran dari para IKM untuk mengurus ijin usaha. Target IKM adalah bagaimana produk yang telah diproduksi terjual banyak dan menguntungkan. Mereka merasa bahwa ijin usah tidak terlalu penting dibandingkan harus mengurus dokumen legal.

Indikator kinerja ini akan tetap menjadi prioritas BPIPI pada periode renstra berikutnya karena penumbuhan IKM masih menjadi target prioritas Direktorat Industri Kecil Menengah dan Aneka khususnya. Kementerian perindustrian memfokusnya industri yang terus tumbuh di Indonesia untuk menopang ekonomi Indonesia.

Selain itu BPIPI mendorong generasi muda untuk mengenal alas kaki melalui IFCC (Indonesia Footwear Creative Competition) yang diharapkan dapat membangun WUB pada generasi muda Indonesia.

Tindak lanjut periode renstra 2020 – 2024 :

- BPIPI melakukan kolaborasi dengan universitas untuk menjangring generasi muda potensial di industri alas kaki
 - Dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru BPIPI mendorong IKM untuk mendapatkan ijin usaha dan memfasilitasi dihubungan dengan dinas terkait dengan BPIPI sebagai endorsnya kepada IKM yang ingin mendapatkan ijin usaha.
 - Selain itu BPIPI mendorong generasi muda untuk mengenal alas kaki melalui IFCC (Indonesia Footwear Creative Competition) yang diharapkan dapat membangun WUB pada generasi muda Indonesia.
 - BPIPI melalui kegiatan inkubator bisnis akan mendorong start up untuk mendapatkan ijin usaha.
2. Pada sasaran strategis system informasi yang andal dengan indikator kenaikan jumlah pelanggan BPIPI melalui sistem informasi tercapai sebesar 93,5 % atau tercapai 18,69 dari

target yang ingin dicapai kenaikan jumlah pelanggan 20%. Tidak tercapainya indikator tersebut karena adanya perubahan sistem informasi yang dikerjakan oleh pihak ke tiga, dimana sistem yang lama dirubah menjadi sistem yang baru. Namun dalam pelaksanaannya pihak ke 3 yang mengerjakan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga waktu yang telah ditetapkan. Sehingga berpengaruh pada sistem layanan pelanggan dan jumlah pelanggan BPIPI yang telah menjadi member pada sistem informasi tidak dapat termonitor.

Tindak lanjut periode renstra 2020 – 2024 :

- Pemilihan vendor untuk pengerjaan sistem informasi berdasarkan hasil seleksi dan dibuat perjanjian terkait dengan pengerjaan kegiatan tersebut.

Tabel 1. 2 Alur Indikator kinerja BPIPI tahun Renstra 2015 – 2019

| Sasaran Strategis (SS)/Sasaran Program | | | | IKK Renstra BPIPI | | Perjanjian Kinerja BPIPI | | |
|--|--|---|-------------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------|
| Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS) | Sasaran Program/indikator | Indikator Kinerja | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional | Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM; | Jumlah Wirausaha Industri Kecil Baru | 20.000 Orang | Meningkatnya jumlah wirusaha baru/wirusaha menengah baru | Jumlah wirusaha indstri kecil baru | Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru | Jumlah wirusaha indstri kecil baru | 30 |
| Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan | Jumlah tenaga kerja industri yang bersertifikat kompetensi. | Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait,dengan indikator kinerja | 10 Kerjasama | Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan Pemberdayaan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait | Penyerapan Jumlah tenaga Kerja | Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan Pemberdayaan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait | Penyerapan Jumlah tenaga Kerja | 2391 TK |
| Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian | Jumlah perusahaan industri yang diadvokasi dan | Terfasilitasinya Pemberdayaan produk | 2.065 IKM | Peningkatan Pemberdayaan Produk | Jumlah prototype yang diproduksi IKM | Peningkatan Pemberdayaan | Jumlah prototype yangdiproduksIKM | 7 prototype |
| Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas | Tersusunnya Rencana Induk Pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perindustrian; | Sistem Informasi yang Handal | 4 aplikasi | Meningkatnya layanan dukungan manajemen | jumlahaplikasisistem informasi yang dikembangkan | Sistem informasi yang andal | Kenaikan member pada sistem informasi | 283 member |
| Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan | Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan | Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel | 100% | | persentase tingkat penyerapan anggaran | Sistem tatakelola keuangan dan BMN yangtransparandan akuntabel | Tingkat penyerapan anggaran | 98,24 |
| Sistem Pengendalian Internal yang Efektif | Jumlah satuan kerja (satker) yang melaksanakan sistem pengendalian internal | Sistem Pengendalian Internal yang Efektif | 2 Satker | | Indeks Kepuasan Pelanggan | Sistem pengendalian internal yang efektif | Indeks Kepuasan Pelanggan | 3,58 |
| | | | | | Indeks Maturitas BPIPI | | Indeks Maturitas BPIPI | 3,82 |
| Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran | Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian | Sistem Pelaporan yang Handal,dengan indikator kinerja | Nilai Sakip 75 | | Nilai SAKIP | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industry | Nilai SAKIP | 81,33 |

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya , rencana aksi perjanjian kinerja disusun sebagai pedoman pelaksanaan dalam mncapai target kinerja. Dalam pelaksanaannya , setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi capaian tersebut melalui Laporan Triwulan, e- monitoring, dan aplikasiALKI.

Adapun hasil capaian kinerja yang dilaksnakan dari masing – masing sasaran strategis adalah sebagaiberikut:

1. Analisis Pencapaian Kinerja Sesuai dengan Perkin (Perjanjian Kinerja).

A. Perspektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S)

1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru

a. Jumlah IKM yang Mendapatkan Ijin Usaha

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|---|--|---------------------|------|--------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru | Jumlah IKM yang mendapatkan ijin usaha | 145 | 118 | 81,40% |

Hingga tahun 2019 BPIPI menargetkan Jumlah IKM yang mendapatkan ijin usaha sebanyak 145 IKM dan hanya tercapai 118 IKM atau 81,40% nya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada industri kecil alas kaki untuk berkembang menjadi industri dengan skala yang lebih besar melalui peningkatan kompetensi SDM Industri alas kaki sehingga dapat meningkatkan jumlah wirausaha baru. Kemudian IKM hasil binaan BPIPI didorong untuk mendapatkan ijin usaha jika ada yang belum memiliki. Beberapa Bimbingan teknis yang dilaksanakan dari tahun 2015 – 2019 diantaranya :

- Bimbingan Teknis Desain dan Pola Alas Kaki
- Bimbingan Teknis Operator Jahit Upper Alas Kaki
- Bimbingan Teknis Manajemen Produksi Alas kaki
- Bimbingan Teknis Assembling Alas Kaki
- Bimbingan Teknis Grading Alas Kaki
- Bimbingan Teknis Pembuatan Prototype Alas Kaki
- Bimbingan Teknis Produksi Alas Kaki Bagi Sentra IKM Daerah
- Bimbingan Teknis Teknologi Penyamakan Kulit Ikan dan Reptil

B. Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

1. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Terkait.

a. Jumlah TenagaKerja yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|--|---|---------------------|------|---------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memperoleh Sertifikat Kompetensi | 4900 | 8891 | 181,40% |

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan mempunyai LSP P-1 dimana selain dapat melaksanakan Bimbingan Teknis juga dapat mensertifikasi personel. Tenaga kerja yang dilatih oleh BPIPI di berikan sertifikat kompetensi. Capaian

ini diperoleh dari Pendidikan 3 in 1 kerjasama dengan BPSDMI, BDI Yogyakarta. Selain itu dari bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh BPIPI secara regular. Indikator kinerja ini tercapai 181,40% dari target 4900 tenaga kerja dan tercapai 8891 tenaga kerja yang telah tersertifikasi dan dinyatakan kompeten.

Tujuan dari kompetensi ini adalah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana kita harus mempersiapkan tenaga kerja yang handal. MEA merupakan tantangan sekaligus peluang karena pasar tenaga kerja dari anggota ASEAN akan bebas masuk ke Indonesia, termasuk ke sector alas kaki dan pemangku kepentingan serta industri alas kaki nasional yang harus menyiapkan tenaga kerja handal dan professional

b. Jumlah kerjasama teknis BPIPI

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|--|-------------------------------|---------------------|------|---------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Perusahaan dan Lembaga Profesi terkait | Jumlah kerjasama teknis BPIPI | 15 | 34 | 145,50% |

Untuk meningkatkan keratifitas dan mencapai tujuan organisasi BPIPI melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya bran local, Universitas, instansi terkait, dan Industri baik besar maupun industri kecil .

Pada periode renstra 2015 – 2019 BPIPI menargetkan 15 kerjasama, dan tercapai 34 kerjasama atau 145, 40% dari angka yang ditargetkan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Produk

a. Jumlah Prototype yang diproduksi oleh IKM

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|---------------------------------------|--|---------------------|------|---------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Peningkatan Pengembangan Produk BPIPI | Jumlah Prototype yang di produksi oleh IKM | 5 | 7 | 140,00% |

Dalam rangka meningkatkan kualitas produk dari sisi desain terutama untuk Industri Kecil dan Menengah, maka BPIPI membuat suatu prototype Pemberdayaan yang karya hasilnya bisa digunakan oleh IKM untuk

diproduksi masal. Upaya ini untuk dilakukan karena beberapa IKM belum memiliki skill dalam desain yang dapat diterima oleh market. Pada periode renstra 2015 – 2019 jumlah prototype yang diproduksi oleh IKM sebanyak 7 Prototype dari 5 prototype yang ditargetkan atau sebesar 140% dari target.

c. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)

1. Sistem Informasi yang andal

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|-----------------------------|---|---------------------|-------|--------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Sistem Informasi yang andal | Jumlah member pada sistem informasi BPIPI | 20 | 28,69 | 93,45% |

Hingga Tahun 2019, sistem informasi yang andal mempunyai capaian kinerja sebesar 93,45% (persen). Capaian kerja sistem informasi yang handal adalah prosentasi peningkatan jumlah membership/anggota yang terdaftar dalam sistem informasi BPIPI. Jumlah anggota yang terdaftar dalam sistem informasi BPIPI sejumlah 1797 anggota per 31 Desember 2019 dimana per

Jumlah membership adalah 1.514 anggota sehingga terjadi peningkatan anggota sebanyak 283 orang. Capaian kinerja sasaran strategis sistem informasi yang andal tidak sesuai dengan target disebabkan karena Pemberdayaan sistem informasi mengalami kendala dalam pengerjaan oleh pihak ke tiga sehingga layanan BPIPI secara online terganggu. Untuk mengatasi kendala tersebut Tim Pengelola Website BPIPI akan memilih penyedia jasa Pemberdayaan sistem informasi tahun 2020 dengan lebihselektif

2. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|--|-----------------------------|---------------------|-------|---------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas | Tingkat Penyerapan Anggaran | 97 | 98,24 | 101,00% |

Hingga Tahun 2019, sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel dengan indikator tingkat penyerapan anggaran mempunyai capaian kinerja sebesar 100% (persen). Capaian kinerja sebesar 100 % (persen) merupakan prosentase realisasi anggaran hingga tahun 2019 sebesar 98,24%

(persen) dibanding dengan target indikator penyerapan anggaran sebesar 97% (persen).

3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|------|---------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Tingkat Kepuasan Masyarakat | Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat | 3,4 | 3,58 | 105,00% |

Hingga tahun 2019, capaian indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat sebesar 100%. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur melalui pengisian kuisioner oleh masyarakat yang telah menggunakan pelayanan BPIPI selama bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Dari hasil pengisian kuisioner yang telah diterima dan ditabulasikan diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,58

4. Sistem Pengendalian yang efektif

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|---------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Sistem Pengendalian yang efektif | Indeks Tingkat Maturitas SPIP | 3,3 | 3,82 | 116,00% |

hingga tahun 2019 sistem pengendalian internal yang efektif mempunyai capaian kinerja sebesar 100% (persen). Capaian kinerja sebesar 100 % diperoleh setelah APIP (Aparat pengawas Intern Pemerintah) Kemenperin melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah) BPIPI dan diperoleh tingkat maturitas SPIP BPIPI sebesar 3,82. Tingkat maturitas SPIP adalah sejauh mana kualitas penerapan SPIP dalam suatu lembaga. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara

5. Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Periode 2015 - 2019 | | |
|----|---|-------------------|---------------------|-------|---------|
| | | | Target | Real | % |
| 1 | Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran | Nilai SAKIP BPIPI | 77 | 80,33 | 104,00% |

Sampai akhir Tahun 2019, meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan indikator kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan nilai minimal 77 memiliki capaian kinerja sebesar 100% (persen) karena evaluasi nilai SAKIP Tahun 2018 BPIPI telah selesai dilaksanakan dan BPIPI memperoleh nilai sebesar 81,33.

SAKIP merupakan sebuah sistem yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi rencana pembangunan dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan

Kendala – kendala yang dihadapi oleh Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan adalah:

1. Tidak tercapainya 1 sasaran strategis dalam rencana strategis BPIPI maupun dalam perjanjian kinerja, dimana sasaran tersebut adalah system informasi yang handal dengan indicator kinerja kenaikan member pada system informasi. Tidak tercapainya indicator tersebut karena adanya perubahan system informasi yang dikerjakan oleh pihak ke tiga, dimana system yang lama dirubah menjadi system yang baru. Namun dalam pelaksanaannya pihak ke 3 yang mengerjakan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga waktu yang telah ditetapkan. Sehingga berpengaruh pada system layanan pelanggan dan jumlah pelanggan BPIPI yang telah menjadimember pada system infromasi tidak dapat termonitor.
2. Capaian PNBPI BPIPI melebihi target yang telah ditetapkan dimana target capaian tahun 2019 sebesar Rp 295.175.000 dan terealisasi sebesar Rp 476.815.000. Akan tetapi penggunaan anggaran PNBPI maksimal hanya sesuai dengan target tidak boleh melebihi. Dapat dilakukan revisi anggaran tetapi revisi tersebut harus persetujuan eselon 1. Pendapatan mencapai nilai tersebut pada akhir bulan sehingga tidak cukup waktu untuk revisi.
3. Penggunaan anggaran PNBPI yang diijinkan oleh Kementerian Keuangan hanya 48% saja

dari pendapatan. Ini sangat tidak proporsional apabila dibandingkan dengan pengeluaran operasional layanan BPIPI

| TA | Total Pagu | Realisasi Pagu | RM | PNBP | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | % Realisasi |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 2011 | 11.000.000.000 | 9.292.616.272 | 9.292.616.272 | - | 257.827.148 | 5.768.731.624 | 3.266.057.500 | 84,48 |
| 2012 | 10.781.494.000 | 10.091.423.497 | 10.091.423.497 | - | 592.047.592 | 6.436.358.405 | 3.063.017.500 | 93,60 |
| 2013 | 9.400.000.000 | 8.690.334.617 | 8.690.334.617 | - | 994.658.497 | 6.883.780.344 | 1.115.652.000 | 92,45 |
| 2014 | 9.150.000.000 | 8.800.078.217 | 8.800.078.217 | - | 1.042.826.927 | 6.914.713.502 | 878.691.000 | 96,18 |
| 2015 | 13.825.000.000 | 13.374.154.060 | 13.374.154.060 | - | 1.274.892.728 | 7.130.273.632 | 4.968.987.700 | 96,74 |
| 2016 | 9.460.050.000 | 9.357.359.750 | 9.365.048.000 | 77.354.250 | 1.300.172.217 | 7.447.527.533 | 609.660.000 | 98,91 |
| 2017 | 10.500.000.000 | 10.208.208.000 | 10.133.269.396 | 74.938.604 | 1.300.172.217 | 7.447.527.533 | 609.660.000 | 97,22 |
| 2018 | 12.909.007.000 | 12.719.651.000 | 12.581.646.000 | 138.005.000 | 3.179.325.000 | 8.459.682.000 | 1.300.000.000 | 98,30 |
| 2019 | 11.758.324.000 | 11.605.754.000 | 11.614.750.000 | 143.484.000 | 3.489.628.000 | 7.594.845.000 | 673.761.000 | 98,24 |

Tabel 1.3 Alokasi Anggaran BPIPI dari tahun ke tahun



Gambar 1.1 Grafik Realisasi Anggaran

Dari awal BPIPI dipercaya untuk diberikan anggaran hingga saat ini kinerja anggaran cukup baik. Ini dapat dilihat di grafik bahwa penyerapan anggaran mengalami kenaikan dan kinerja 2017 hingga 2020 cukup maksimal.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pada tahun 2016 BPIPI diperkanankan memungut biaya untuk layanan yang ada. Penerimaan PNBP BPIPI dari awal hingga tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

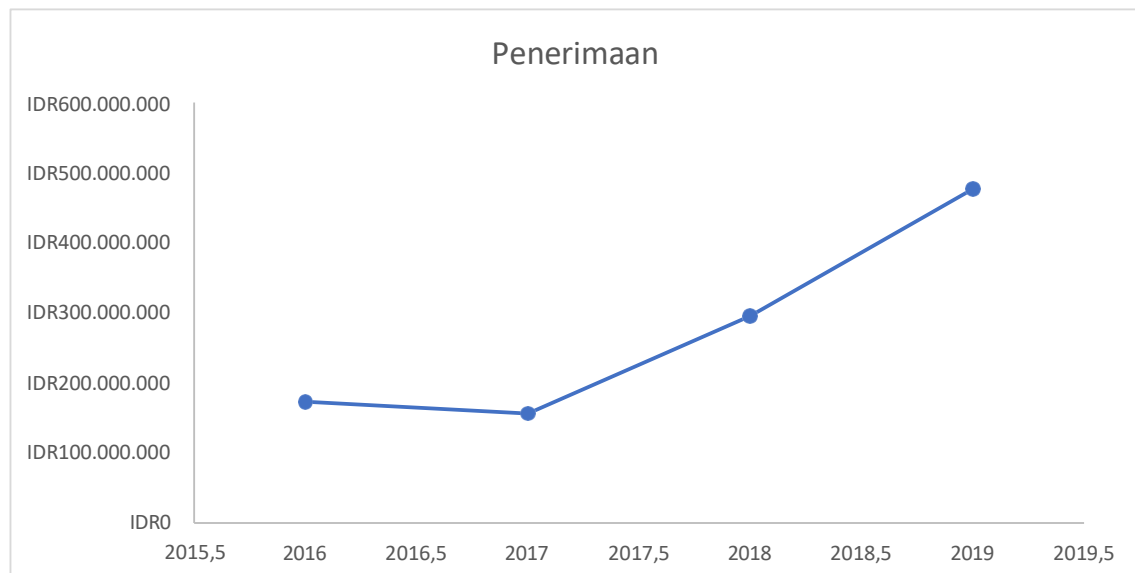
Penerimaan PNBP Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia berasal dari :

1. Jasa pelayanan teknis pengujian dari kalibrasi
2. Pelatihan kontraktual

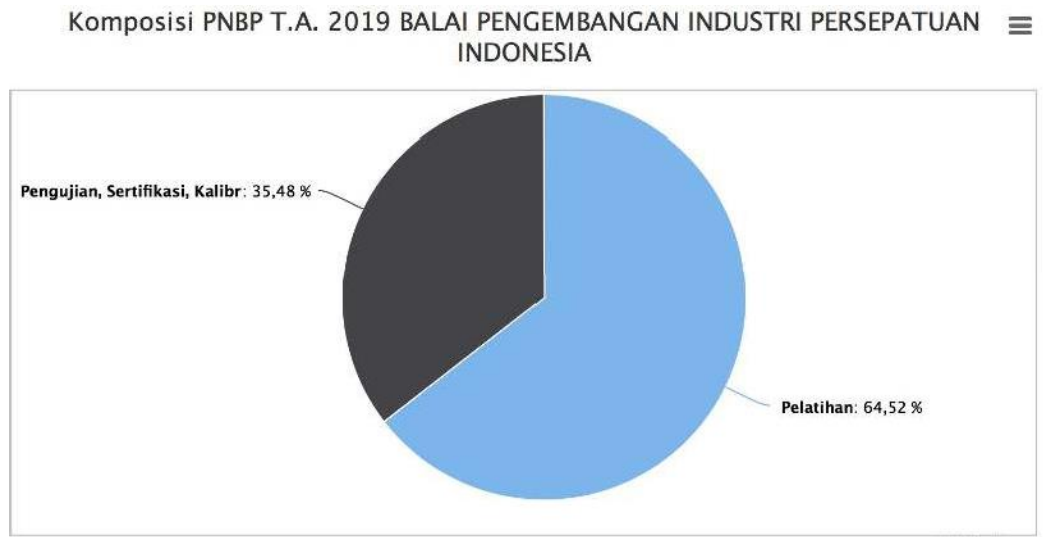
Kinerja penerimaan PNBP dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut

Tabel 1.4 Penerimaan PNBP dari tahun ke tahun

| No | Tahun | Penerimaan |
|----|-------|----------------|
| 1 | 2016 | IDR173.184.150 |
| 2 | 2017 | IDR156.122.091 |
| 3 | 2018 | IDR295.175.000 |
| 4 | 2019 | IDR476.815.000 |



Gambar 1.2 Penerimaan PNBP dari tahun ke tahun



Gambar 1.3 Persentase penerimaan PNB setiap jasa layanan

Kendala - kendala kendala terkait dengan penerimaan negara bukan pajak diantaranya :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KMK.02/2015 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia , Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian maka ijin penggunaan penerimaan Negara dari total pendapatan Negara sebesar 48%. Besaran ini tidak sebanding dengan dana operasional yang harus dikeluarkan dengan jenis layanan yang diberikan. Sehingga seringkali dalam melaksanakan kegiatan jasa layanan harus subsidi silang dari dana RM BPIPI. Masa transisi dari jasa layanan yang sebelumnya gratis menjadi berbayar sedikit banyak sangat berpengaruh pada pendapatan penerimaan PNB yang sekaligus berbanding lurus dengan LHU yang diterbitkan laboratorium uji Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia(BPIPI).
2. Capaian PNB BPIPI melebihi target yang telah ditetapkan dimana target capaian tahun 2019 sebesar Rp 295.175.000 dan terealisasi sebesar Rp 476.815.000. Akan tetapi penggunaan anggaran PNB maksimal hanya sesuai dengan target tidak boleh melebihi. Dapat dilakukan revisi anggaran tetapi revisi tersebut harus persetujuan eselon 1. Pendapatan mencapai nilai tersebut pada akhir bulan sehingga tidak cukup waktu untuk revisi.
3. Banyak parameter pengujian lab uji yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2011

tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku di Kementerian Perindustrian yang menyebabkan BPIPI tidak dapat menerima pengujian.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

POTENSI BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

Setelah pandemic pada tahun 2021, Industri alas kaki pada tahun 2022 mengalami kebangkitan. Dimana banyak industri yang mulai bangkit kembali. Dimana pada tahun ini optimisme bisnis masih terasa memberikan energi positif untuk melakukan ekspansi. Sesuai dengan peta roadmap industri di Indonesia industri Alas kaki merupakan salah satu industri yang menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia untuk terus dikembangkan karena mampu memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal ini karena industri alas kaki merupakan industri padat karya dan berorientasi ekspor. Industri alas kaki Indonesia mampu menapak di kancah global, dengan menghasilkan beragam produk yang berkualitas dan inovatif.

Pandemi, memukul seluruh sektor industri pada awal tahun 2019 hingga 2021 tak terkecuali industri alas kaki. Pertumbuhan industri sempat turun hingga 8% pada tahun 2020, dan kembali menunjukkan trend positif dengan pertumbuhan 7% di tahun 2021. Berdasarkan data dari Aprisindo, nilai produksi turun 70-80% termasuk penyerapan tenaga kerja turun hingga 70% (termasuk di dalamnya industri skala menengah dan kecil). Awal 2022 kinerja industri alas kaki nasional menunjukkan tren positif. Data dari BPS menunjukan pada kuartal pertama tahun 2022, pertumbuhan terhadap PDB industri alas kaki sebesar 7,1 trilyun rupiah dengan nilai ekspor sebesar 1,9 milyar USD.

Pasca pandemi dipastikan landscape industri sneaker berubah. Transformasi industri, supply chain, disrupsi digital, perubahan sosial merubah pola industri alas kaki domestik

khususnya sneaker. Tidak seperti periode 2020-2021 dimana hampir seluruh IKM alas kaki pada mode survival, awal tahun 2022 kondisi secara umum telah membaik. Pelajaran berharga saat pandemi, membuat merk-merk lokal melakukan berbagai perubahan untuk bisa bertahan selama pandemi.

Berdasarkan data dari BPS, kinerja ekspor impor industri alas kaki menunjukkan sinyalemen positif. Tahun 2022 kuartal 3, ekspor alas kaki sebesar USD 5,949 milyar atau naik dibanding tahun 2021 kuartal 3 (USD 4,388 milyar). Sedangkan tahun 2022 kuartal 3, impor alas kaki sebesar USD 758 juta atau naik dibandingkan tahun 2021 kuartal 3 (USD 511 juta). Meskipun ada potensi resesi, tahun 2022 kuartal 3 neraca perdagangan industri alas kaki surplus sebesar USD 5,191 milyar.

Belajar dari pandemi, berdasarkan data dari BPIPI terjadi pergeseran pasar terutama dalam strategi penentuan harga dan pemasaran. Beberapa merk-merk lokal besar yang selama ini menentukan harga di pada level tinggi (di atas 500 ribu), saat ini cenderung menentukan posisi harga di level menengah bahkan rendah (200 – 400 ribu). Hal ini mengingat potensi pasar pada dengan daya beli di kisaran (100 – 300 ribu) mempunyai volume yang sangat tinggi. Beberapa merk lokal dengan segmen pasar rendah menengah ternyata mempunyai kemampuan mengelola merk dengan sangat baik, sehingga meskipun menjual dengan harga murah namun tetap tidak murahan. Sehingga hal ini menjadi pelajaran menarik bagi beberapa merk-merk lokal yang sebelumnya menasar daya beli menengah (di atas 500 ribu) perlu banyak belajar mempertahankan citra merk yang tetap positif meski dengan segmen pasar yang sama.

Peran BPIPI dalam ekosistem industri alas kaki khususnya skena sneaker lokal fokus pada (1), penguatan hubungan kemitraan antara merk-merk lokal dengan IKM sebagai mitra utama produksi. IKM sebagai mitra produksi harus memanfaatkan potensi pasar dengan memberikan layanan kualitas proses produksi yang standard dengan harga yang menarik. (2) menjaga ekosistem industri alas kaki dengan memberikan informasi dan pengetahuan bagi merk-merk lokal tentang pentingnya melakukan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan.

Untuk itu Industri alas kaki terus didorong perkembangannya oleh Pemerintah Indonesia. Sudah terbukti bahwa alas kaki Indonesia mampu menembus pasar dunia. Dengan adanya peluang tersebut maka dalam rangka meningkatkan daya saing industri persepatuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian memasukan industri persepatuan sebagai

industri prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 – RPJM). Kementerian Perindustrian RI pun sudah menetapkan Road Map dalam upaya mencapai visi industri persepatuan nasional sebagai negara industri persepatuan berkualitas dunia. Dengan sasaran-sasaran strategis (kuantitatif & kualitatif) dan *action plan* yang sudah disepakati bersama semua *stakeholders* diharapkan target jangka panjang industri persepatuan nasional dapat tercapai. Fokus pembangunan industri persepatuan nasional mempunyai tujuan utama:

- Penyerapan Tenaga Kerja
- Pertumbuhan Ekonomi & Investasi
- Peningkatan Devisa dengan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor
- Meningkatnya daya saing industri alas kaki

Secara generik maka strategi industri nasional ke depan harus diarahkan kepada upaya memperkuat rantai nilai industri dalam negeri serta menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah. Dengan peluang tersebut maka Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia yang merupakan satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki berbagai layanan dibidang persepatuan dengan anggaran dari Rupiah murni maupun dari Pendapatan Negara Bukan Pajak diantaranya : (1) Layanan pengujian alas kaki, (2) Layanan konsultasi teknis, (3) Pendampingan mutu dan pendampingan teknis, (4) Pemanfaatan hasil Pemberdayaan BPIPI, (5). Lembaga Sertifikasi Profesi, (6) Penguatan Kemitraan Untuk itu Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung layanan tersebut.

a) Kelembagaan

Jika dilihat dari aspek kelembagaan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sudah cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta visi dan misi yang sudah ditetapkan. BPIPI secara tidak langsung mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung RIPIN (Rencana Induk Pemberdayaan Industri Nasional) yang menempatkan industri alas kaki sebagai industri prioritas dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Aspek kelembagaan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia perlu ditingkatkan dalam memperkuat peran BPIPI dalam mendukung perekonomian Negara.

Dalam meningkatkan integritas organisasi, BPIPI secara khusus menginisiasi program BPIPI *to the next level*. Program ini didorong sebagai komitmen bentuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam jangka menengah (2020-2024) BPIPI *to the next level* secara bertahap akan implementasikan sebagai budaya organisasi yang secara konsisten meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan paradigma baru, BPIPI sebagai organisasi yang melayani kedepan akan mengoptimalkan berbagai media dan infrastruktur teknologi sebagai yang menawarkan platform baru bagaimana BPIPI melayani masyarakat industri dengan lebih baik, transparan, profesional dan menegakkan integritas.

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia didukung oleh kegiatan kemitraan, kreativitas, pendampingan, laboratorium pengujian, Lembaga sertifikasi personel, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan dalam organisasinya sudah menerapkan ISO 9001 : 2015 untuk memantau kinerja organisasi BPIPI

- **Kolaborasi Desain dan Pemberdayaan**

Desain dan Pemberdayaan BPIPI akan bertumpu pada bagaimana hasil prototype bermanfaat untuk industri alas kaki. Sehingga strategi kolaborasi dengan industri atau brand local menjadi bagian rencana strategis BPIPI. BPIPI mempunyai program antara lain: (1) Prototype design, dimana BPIPI mendesain alas kaki hingga menjadi prototype dimana prototype karya BPIPI dapat di produksi oleh Industri Kecil dan Menengah. Selain itu, sasaran dari Pemberdayaan prototype design adalah kolaborasi Pemberdayaan desain alas kaki dengan industri yang nantinya output dari kegiatan tersebut adalah hasil prototype dapat diproduksi oleh industri baik industri kecil, menengah maupun industri besar. Ini menjadi sasaran target BPIPI dalam pembinaan terhadap Industri kecil dan Menengah maupun industry besar. (2) 3 in 1 Creative center : dimana dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi dunia persepatuan, BPIPI meyenggarakan kompetisi tingkat internasional diantaranya kompetisi design sepatu, kompetisi fotografi dan kompetisi videografi. Hasil dari karya kompetisi ini dapat dimanfaatkan oleh industri alas kaki. (3) BPIPI didukung peralatan design yang cukup memadai diantaranya laboratorium design, shoe maker sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna Pemberdayaan.

- **Laboratorium uji alas kaki**

BPIPI memiliki laboratorium pengujian alas kaki yang sudah terakreditasi ISO 17025:2015 dengan ruang lingkup (1) sepatu pengaman, (2) sepatu Pria ,(3) sepatu wanita, (4) sepatu olah raga, (5) sepatu dinas harian dan (6) sepatudinas lapangan. Tidak hanya untuk produk alas kaki tetapi juga diperuntukkan untuk bahan baku pendukung seperti kulit, asesoris dll. Dengan tes metode SNI, ISO dan SNI ISO Laboratorium BPIPI dilengkapi dengan peralatan yang up to date dan lengkap dalam menunjang kegiatan pengujian. Dimulai tahun 2017 Laboratorium BPIPI dilengkapi dengan pengujian kimia untuk mendukung ecolable alas kaki dan memenuhi kebutuhan industri besar dalam mendukung ekspor ke negara Eropa yang mempersyaratkan ecolable.

- **Pusat Pendampingan Alas kaki**

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Hingga tahun 2022 alumni BPIPI mencapai 3099 IKM/orang yang sudah dilatih oleh BPIPI. BPIPI memiliki 16 instruktur dengan berbagai bidang pelatihan. Jenis pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan diantaranya : pelatihan jahit upper alas kaki, desain alas kaki grading alas kaki, pembuatan produk kulit, manajemen alas kaki, teknologi alas kaki untuk TPL, Teknisi mesin jahit, assembling, teknologi produksi alas kaki, branding, penyamakan kulit. Selain pelatihan reguler dalam rangka meningkatkan kegiatan PNBPI BPIPI menyelenggarakan pelatihan short course bagi yang berminat pembelajaran mengenai sepatu untuk masyarakat umum.

- **Lembaga Sertifikasi Sertifikasi Personel (LSP – P1)**

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai Lembaga Sertifikasi Personel P1 untuk menjamin kompetensi dari IKM/personel yang sudah di latih. Ruang lingkup LSP P1 adalah jahit upper. LSP P1 BPIPI juga sudah dilengkapi dengan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memadai untuk lingkup yang ada. Pada tahun 2022 BPIPI mengajukan perluasan ruang lingkup LSP menjadi 6 lingkup diantaranya : jahit upper, membuat pola master alas kaki secara manual. Melakukan grading pola alas kaki system manual, membuat pola bottom alas kaki secara manual, melakukan proses cutting dengan cara manual, melakukan proses cutting dengan mesin

- **Tempat Uji Kompetensi (TUK)**

BPIPI memiliki Tempat Uji Kompetensi lingkup jahit untuk ujian sertifikasi personel yang disertifikasi oleh LSP – P1.

- **Inkubator Bisnis Teknologi Alas Kaki**

Sebagai wujud tugas dan fungsi BPIPI dalam pembinaan IKM alas kaki, di BPIPI terdapat inkubator bisnis yang diperuntukkan bagi IKM yang membutuhkan bimbingan dalam Pemberdayaan industrinya. Sebagai bagian dari kebijakan strategis Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), IBT Alas Kaki akan mengambil peran penting dalam percepatan penumbuhan perusahaan pemula sektor alas kaki (didalamnya kulit dan barang jadi kulit). IBT Alas Kaki mengambil konsep dasar dalam Pemberdayaan organisasinya melalui 4 komponen utama (1) Kewirausahaan, (2) Inovasi, (3) Pasar dan (4) Jejaring.

- **Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)**

LSPro menjadi bagian penting rencana BPIPI dalam periode rencana strategis 2020 – 2024. Lembaga ini akan menjadikan BPIPI bisa memfasilitasi kebutuhan industri terkait standardisasi produk, pendampingan manajemen mutu dan manajemen industri. Rencana inisiasi LSPro akan di implementasikan pada awal tahun 2024.

b) Kemampuan layanan

Selain layanan kelembagaan Desain, Bimbingan Teknis, Laboratorium Uji, LSP P1 Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai jasa layanan yang lain diantaranya:

1. Konsultasi Teknis bidang alas kaki dan produk kulit
2. Sebagai pusat informasi alas kaki dan produk kulit
3. Diklat 3 in 1 yang bekerjasama dengan Pusat Pendidikandan Pelatihan, Kementerian Perindustrian dimana kegiatan ini meliputi pelatihan, uji kompetensidan penempatan kerja di industri.

c) Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) didukung oleh 58 orang. Sumber daya yang dimiliki oleh BPIPI

merupakan potensi yang penting dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPIPI. SDM

yang berjumlah 58 orang terdiri dari karyawan PNS sebanyak 33 orang, 6 Tenaga ahli non PNS, 19 orang adalah tenaga non PNS. Jabatan yang ada di BPIPI terdiri dari eselon III sebanyak 1 orang, eselon 4 sebanyak 1 orang. Di BPIPI ada jabatan fungsional khusus, yaitu penguji mutu barang, instruktur, arsiparis sedangkan yang lainnya masih fungsional umum dan struktural. Rician profil SDM menurut jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Profil SDM berdasarkan jabatan

| No | Jabatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Struktural eselon III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Struktural eselon IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Bendahara | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Fungsional PMB | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Fungsional Instruktur | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | Fungsional arsiparis | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Fungsional Pranata Komputer | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Fungsional umum | 36 | 37 | 37 | 48 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 |
| Jumlah | | 40 | 41 | 41 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 |

Tabel 1.6 Profil SDM berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Magister | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 2 | Sarjana | 11 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 |
| 3 | Diploma III | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 4 | Diploma I | | | | | | - | 1 | 1 |
| 5 | SMA/Sederajat | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | SD | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 40 | 41 | 41 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 |

d) Aspek Jejaring Kerja

Dalam mendukung kegiatan BPIPI dalam hal teknis maupun manajemen, beberapa diantaranya adalah kerjasama dengan perusahaan asosiasi maupun universitas. Berikut daftar Mou BPIPI :

1. Dinas perindustrian dan Perdagangan kota Pasuruan
2. CV. Fortuna Shoes
3. PT.Kharisma Baru Indonesia
4. PT.Widaya Inti Plasma
5. PT.Sengdam Jaya Abadi
6. PT Dwi PrimaSentosa

7. PT Adis DinamikaSentosa
8. PT. Shoetown Ligung Kasokandel - Majalengka
9. Aprisindo
10. Universitas Ciputra
11. Universitas Brawijaya
12. STTS Surabaya
13. Universitas Nahdatul Ulama
14. Universitas Prasetya Mulya
15. Universitas Maranatha
16. Fablab Bandung
17. Brodo
18. Footwear Forum
19. Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
20. Institute Teknologi Bandung

f.) Aspek Geografis

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terletak di Jawa Timur tepatnya di komplek wisata tanggulingin, desa Kedensari. wilayah ini merupan sentra IKM produk kulit (tas, alas kaki, dompet dll) di Jawa Timur, menjadikan BPIPI sebagai ujung tombak untuk peningkatan IKM di Jawa Timur khususnya untuk sektor alas kaki dan Indonesia pada umumnya.

g.) Aspek Eksternal

Karena pentingnya peranan alas kaki yang merupakan produk konsumsi masyarakat, maka banyak industri alas kaki yang berkembang di Indonesia. Industry alas kaki termasuk dalam klasifikasi industri padat karya sehingga dapat dijadikan industri unggulan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemasukan devisa Negara. Selain itu, industri ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor.Kebutuhan akan produk alas kaki baik dalam negeri maupun luar negeri terus meningkat. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi alas kaki, mengingat pentingnya kegunaan alas kaki yang merupakan kebutuhan primer setiap manusia Apabila dilihat

dari proyeksi penambahan penduduk Indonesia maka alas kaki merupakan peluang bisnis yang cukup bagus. Menurut BPS data proyeksi penduduk di Indonesia hingga tahun 2035 adalah sebagaiberikut:

Tabel 1.7 Proyeksi penduduk Indonesia hingga tahun 2035

| Tahun | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Jumlah penduduk (ribuan) | 271.066,30 | 284.289,00 | 296.405,10 | 305.652,40 |

Berdasarkan table tersebut diatas hingga tahun 2035 penduduk Indonesia mencapai 305.652,40 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka peluang permintaan industry alas kaki akan meningkat.

Berbicara tentang alas kaki tentu erat kaitanya dengan fashion mode tren yang paling terupdate, alas kaki kini bukan hanya menjadi kebutuhan primer yang digunakan sebagai pelindung kaki saja tetapi juga merupakan trend mode yang setiap saat selalu berubah/update. Ini merupakan suatu peluang bagi produsen alas kaki di Indonesia untuk meningkatkan produksi alas kaki. Industri sepatu/alas kaki nasional memiliki potensi untuk berkembanglebih besar selain dengan seiring dengan pertumbuhan mode juga dipengaruhi pertumbuhan penduduk dunia. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk dunia secara garis lurus maka semakin tinggi kebutuhan akan alas kaki. Selain itu, pemerintah menggalakkan ekspor sektor non migas dimana industri alas kaki merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan dari berbagai komoditi lainnya dalam fenomena perekonomian dewasa ini. Potensi – potensi ini menjadi peluang bagi industri alas kaki di Indonesia dalam meningkatkan produksi. Tentunya produsen harus bisa menciptakan alas kaki yang berdaya saing, misalnya dari segi kualitas, kuantitas, mode, desain agar mampu bersaing dengan pasar dunia.

Untuk lebih meningkatkan industri alas kaki di Indonesia era digitalisasi akan berperan sangat penting. Era saat ini revolusi industri 4.0 sedang digalakkan untuk industri – industri yang sudah siap menghadapi tantangan. Industri 4.0 lebih fokus pada penciptaan sebuah

produk, prosedur dan proses manufaktur yang cerdas.

Manufaktur cerdas (Smart factories) menyediakan customer dengan produk dan layanan cerdas yang akan terhubung ke internet. Kemudian, smart factories akan mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari produk pintar dan aplikasi pintar terkait. Analisis ini memungkinkan pabrik-pabrik untuk mendefinisikan perilaku dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan memberi mereka produk dan layanan baru yang lebih berkelanjutan. Selain itu, teknologi IoT (internet of thing) memungkinkan pelanggan terlibat dalam proses desain produksi.

PERMASALAHAN BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

a. Sumber Daya Manusia

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan industri alas kaki yang dibutuhkan, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaku usaha bidang alas kaki. Perlunya sumber daya manusia yang lebih lagi dibanding saat ini, untuk memperluas ruang lingkup BPIPI sebagai leader pemerintah yang khusus menangani alas kaki. Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia merupakan organisasi teknis yang sektor alas kaki yang menjadi pusat Pemberdayaan alas kaki di Indonesia, untuk itu maka kemampuan teknis personal yang membidangi alas kaki menjadi hal yang paling penting. Bukan secara informal tetapi secara formal SDM yang mendukung BPIPI harus diakui oleh suatu Badan/ Lembaga salah satunya dengan sertifikasi personil bidang alas kaki. SDM teknis di Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) belum bersertifikat profesi walaupun secara teknis SDM BPIPI sangat berkompeten. Oleh karena itu sistem manajemen yang berkualitas menjadi pendukung dalam memperbaiki permasalahan ini.

b. Saran dan Prasarana

Menjadi kendala saat ini adalah sarana prasarana gedung perkantoran Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. BPIPI merupakan satuan kerja dibawah Ditjen IKMA Kemenperin yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan industri alas kaki, kulit dan barang kulit khususnya IKM di seluruh Indonesia. Sebagai bagian penting dari ekosistem industri, BPIPI mempunyai peran penting bagaimana meningkatkan kualitas SDM industri, memberikan layanan konsultasi industri, Pemberdayaan desain dan

teknologi alas kaki, pelayanan mutu dan sertifikasi serta memfasilitasi aktifitas jejaring dan kolaborasi industri. Dengan perannya yang sentral khususnya pada pembinaan IKM alas kaki, sejak pertama kali inisiatif proyek IFSC (Indonesia Footwear Service Centre) tahun 2003 hingga BPIPI tahun 2022 telah mempunyai alumni lebih dari 12.360 orang dimana 2.964 orang adalah pengusaha IKM dan 9.396 adalah tenaga kerja terampil industri dan tersebar di seluruh sentra potensi industri di Indonesia.

Peran penting BPIPI tidak bisa lepas dari kontribusi dan komitmen pemangku kepentingan yang menjadi bagian sejarah penting BPIPI hingga saat ini. Dimulai tahun 2003, kolaborasi Kementerian Perindustrian, Pemerintah provinsi Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) inisiatif membentuk IFSC sebagai jawaban atas kebutuhan industri alas kaki nasional bagaimana menyiapkan SDM industri dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri menuju daya saing industri alas kaki nasional. Karena kebutuhan dan dinamika industri alas kaki dan tuntutan perubahan tata kelola organisasi yang lebih baik, tahun 2011 menjadi momentum penting proses transformasi IFSC menjadi BPIPI. Perubahan tata kelola organisasi saat itu menuntut kepemilikan aset sebagai bukti kontribusi dari masing-masing pihak harus dikelola dengan status single asset. Sehingga sebagai bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan atas keberlangsungan layanan BPIPI, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan APRISINDO menyerahkan seluruh bantuan pembangunan Gedung dan aset mebeuler bangunan APRISINDO termasuk tanah (5.500 m²) yang telah dibeli oleh Pemkab. Sidoarjo dari pengusaha lokal untuk diserahkan kepada Pemkab. Sidoarjo dengan status single asset.

Transformasi yang di mulai tahun 2011 sampai 2022 menghasilkan kinerja layanan yang lebih optimal dari sebelumnya. BPIPI dengan tugas dan fungsinya menjadi lebih optimal memberikan kontribusi manfaat bagi industri khususnya IKM alas kaki. Program dan kegiatan BPIPI kepada industri alas kaki lebih terintegrasi mulai dari pemenuhan SDM, kualitas produk, informasi pemasaran hingga fasilitasi jejaring dan kolaborasi industri.

Kebermanfaatan dan dampak BPIPI terhadap industri khususnya di Sidoarjo juga lebih fokus menyentuh pada kebutuhan riil IKM antara lain:

- a. Program restrukturisasi mesin industri alas kaki telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan baik skala kecil hingga besar khususnya di Sidoarjo.
- b. Program Pemberdayaan SDM industri alas kaki dimana lebih dari 30% alumni berasal

dari Jawa Timur khususnya Sidoarjo. (Sentra Tas & Koper Tanggulangin, Sentra Sandal Wedoro – Waru dan Sentra SepatuKrian).

- c. Program rebranding sentra Tanggulangin yang diluncurkan sejak tahun 2017 merupakan program membangkitkan kembali potensi dan kejayaan industri di Sidoarjo menjadi wisata 3in1 (wisata belanja – Pendidikan dan budaya) yang diintegrasikan dengan program ekonomiSidoarjo.
- d. Program DAK (Dana ALokasi Khusus) Kementerian Perindustrian yang dimanfaatkan oleh Pemkab. Sidoarjo sejak tahun 2018-2019 digunakan untuk mengembangkan infrastruktur fisik guna mendukung konsep rebranding sentra Tanggulangin.

Semua dampak positif dari keberadaan BPIPI yang dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo hingga saat ini tentu tidak lepas dari komitmen peran dan tanggung jawab Kementerian Perindustrian Pemkab. Sidoarjo, Pemerintah provinsi Jawa Timur dan APRISINDO dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Terkait perpanjangan pinjam pakai hingga tahun 2025, maka BPIPI telah merencanakan untuk pembelian aset tanah pada tahun 2021 dan pembangunan fasilitas Gedung pada tahun 2022, sehingga diperkirakan siap menggunakan aset tanah dan bangunan sendiri pada tahun 2023. Adapun rencana relokasi BPIPI tetap memprioritaskan wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi baru.

c. Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan pandangan hidup sebagai nilai - nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita - cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Budaya Kerja manajemen meliputi Pemberdayaan, perencanaan, produksi, dan layanan jasa yang memuaskan. Untuk mencapai tujuan organisasi budaya kerja merupakan faktor yang penting. Cara kerja pegawai yang identik dengan birokrasi yang berbelit - belit, kurang terbuka dengan orang lain, lamban bekerja, kaku, serta kurang percaya pada kemampuan seseorang menjadi pemicu belum optimalnya budaya kerja di lingkungan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. Hal ini juga disebabkan adanya masa transisi dari IFSC menjadi Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. Dimana IFSC merupakan organisasi hasil kerjasama antara pemerintah Italy dengan pemerintah Indonesia yang secara birokrasi belum menjadi milik pemerintah (swasta) dan kemudian

beralih ke birokrasi pemerintahan (BPIPI).

d. Hambatan administrasi untuk perluasan layanan

Dalam meningkatkan kinerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) pada layanan IKM sektor alas kaki maka perluasan layanan BPIPI sangat diperlukan diantaranya perluasan lingkup lab uji, perluasan lingkup sertifikasi personel dan jasa layanan yang lainnya. Dalam perluasan tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar.

e. Konsolidasi internal organisasi masih lemah

Dalam bekerja secara team komunikasi menjadi hal yang cukup penting. Terjadinya miskomunikasi yaitu terjadinya kesalahan dalam salah satu proses komunikasi antar personal menghambat kinerja satuan organisasi. Seringnya terjadi miskomunikasi menyebabkan perbedaan pendapat yang akhirnya berdampak pada tercapainya tujuan atau misi organisasi yang telah ditetapkan.

Permasalahan Eksternal

a. Masalah Visi Nasional

Sebagaimana RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) pemerintah yang menempatkan industri persepatuan sebagai prioritas pembangunan, perlu digarisbawahi bahwa belum adanya persepsi yang sama tentang Visi Nasional Pemberdayaan industri persepatuan menjadi hambatan utama Pemberdayaan di level mikro/teknis. Kendala sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi menjadi masalah klasik yang seolah-olah terjadi berulang-ulang pada tataran pengambil kebijakan. Sementara itu, pelaku teknis/pengusaha/asosiasi mengharapkan fungsi fasilitasi pemerintah terhadap dunia bisnis dapat berjalan efektif dengan tindakan nyata yang berpihak pada Pemberdayaan ekonomi nasional. Kalau kita mengacu pada roadmap 2007 industri persepatuan yang dibuat bersama dengan Kementerian Perindustrian, dalam jangka panjang industri persepatuan nasional mempunyai visi sebagai salah satu negara dengan industri berkelas dunia. Tahun 2009 dalam roadmap tersebut sudah melalui proses/stage 1 dari keseluruhan proses panjang sampai tahun 2025. Dalam stage 1 tersebut, inisiasi strategi clustering industri persepatuan sudah dimulai di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Barat dan beberapa daerah lain. Dalam beberapa kluster industri alas kaki di daerah cukup berhasil. Dengan didukung data meningkatnya inisiatif pada level mikro

perusahaan untuk lebih mempunyai inisiatif dalam Pemberdayaan industri persepatuan. Berikut sasaran nasional industri persepatuan jangka panjang.

b. Masalah Regional dan Global

Proteksi beberapa negara terhadap beberapa sektor produksinya memang menjadi tantangan bagi kinerja ekspor nasional seperti kebijakan non tarif di beberapa negara menurunkan kinerja ekspor alas kaki nasional. Munculnya negara negara dunia ketiga yang sekarang menjadi pemimpin industri dunia. China, Inda dan Vietnam menjadi punya peran lebih penting dalam posisi industri global dunia. Efek pasar global dengan konsekuensinya menjadikan pasar nasional hampir tanpa proteksi. Dampaknya produk impor dengan harga kompetitif semakin melimpah. Konsumen lokal menjadi punya banyak pilihan.

c. Masalah Level Mikro Perusahaan

Pada pihak perusahaan sendiri tidak lepas dari segala permasalahan internal yang secara tidak langsung mempunyai dampak pada efisiensi produksi, efektifitas kinerja dan produktifitas tenaga kerja. Berdasarkan data dari BPS tahun 2019, bahwa populasi UMKM di Indonesia lebih dari 58,9 juta orang, artinya lebih dari 25% dari populasi adalah pelaku usaha. Selain itu terdapat data yang menarik, menurut SBA (Small Business Association) hanya 70% populasi usaha bertahan di dua tahun pertama, sedangkan 50% masih bisa bertahan pada tahun ke-5 dan 34% populasi saja yang bertahan pada tahun ke-10 dan hanya 25% yang mampu bertahan di tahun 15. Hasil akhirnya adalah daya saing perusahaan dan retensinya terhadap perubahan lingkungan sangat rendah. Perubahan lingkungan /pasar saat ini sering tidak diantisipasi oleh perusahaan. Perkembangan proses produksi, teknologi terapan dan perubahan permintaan pasar yang tidak mampu diikuti oleh perusahaan mengakibatkan daya saing perusahaan menurun. Proses selanjutnya akan terjadi penurunan order, terjadinya PHK dan akhirnya tutup. Hal ini tidak dapat dihindari jika perusahaan tidak cepat berubah dan tanggap terhadap perubahan. Bagaimana dengan bisnis alas kaki. Fakta di lapangan bahwa sebagian besar IKM adalah perusahaan “bonsai”. Respon pikiran pelaku usaha alas kaki masih banyak yang beranggapan bahwa bisnis nya masih terbatas sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga mind set bisnis hanya untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup sangat mempengaruhi respon

pikiran bagaimana mengembangkan bisnisnya. Ini menjadi tantangan terbesar pelaku industri alas kaki bagaimana bisa berkembang, tumbuh dan tidak terus menjadi “bonsai”.

d. Masalah Sektoral Industri

Tema rantai nilai industri dan material berkelanjutan di industri alas kaki nasional semakin mendapatkan perhatian banyak pihak. Dari sisi pasar, kebutuhan dan perhatian konsumen atas produk ramah lingkungan semakin meningkat seiring kesadaran akan menggunakan bahan dan produk ramah lingkungan. Tahun 2019, konsumsi domestik alas kaki mencapai 971 juta pasang, angka ini ke-3 tertinggi konsumsi setelah China dan Vietnam. Potensi pasar domestik yang cukup besar seharusnya bisa di optimalkan oleh industri dalam negeri sehingga konsumsi domestik alas kaki terus naik. Ditambah lagi Indonesia menempati ranking 3 besar eksportir dunia sebesar 406 juta pasang setelah China dan Vietnam.

Dari sisi hulu, rantai nilai industri alas kaki, industri penyamakan kulit merupakan sektor hulu yang strategis untuk memperkuat potensi hilir industri alas kaki nasional. Saat ini Industri penyamakan kulit berjalan dengan riil kapasitas produksi mencapai 28 ribu ton atau 116 juta sqf. Angka tersebut hanya 50% dari kapasitas terpasang industri kulit nasional saat ini yang mencapai 70 ribu ton atau 240 juta sqf. Besarnya kapasitas produksi terpasang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan domestik industri alas kaki yang saat ini masih harus impor bahan khususnya kulit hingga 60%. Dari data di atas menunjukkan bahwa rantai nilai industri alas kaki tidak cukup kuat saling mendukung antara hulu dan hilir nya. Dari banyaknya tantangan dalam memperkuat rantai nilai industri alas kaki ini, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) melihat ada tema yang menarik yaitu bagaimana memperkuat peran industri hulu (kulit) untuk melakukan proses link & match khususnya tema riset dan Pemberdayaan kulit dengan akademisi – industri – pemerintah. Tema riset dan Pemberdayaan di industri kulit perlu terus dipacu oleh berbagai pihak. Kebutuhan industri hilir akan bahan kulit maju dan ramah lingkungan akan menjawab kebutuhan industri alas kaki yang tuntutan produknya semakin dinamis. Riset dan Pemberdayaan kulit maju perlu digulirkan oleh industri penyamakan kulit dengan akademisi. Potensi peneliti dalam negeri terhadap bahan material maju (khususnya kulit) perlu di dorong untuk menjawab kebutuhan pasar. Terlebih lagi saat ini beberapa keluhan industri alas kaki pada kulit dalam negeri yang

masih mengandung krom (VI) melebihi ambang batas untuk persyaratan ekspor maupun kebutuhan industri dalam negeri.

Adanya link & match antara industri dan dunia pendidikan akan mengurangi beban industri untuk melakukan riset dan Pemberdayaan mandiri dimana investasinya tidaklah murah. Di sisi lain, dunia pendidikan membutuhkan obyek riset yang lebih riil dan langsung berdampak pada industri, sehingga perlu adanya komunikasi yang lebih terbuka dan intensif dengan tujuan membuka semua potensi riset dan penelitian di industri penyamakan kulit.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS & PLATFORM ORGANISASI

A. VISI

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Kecil, Menengah dan Aneka maka visi BPIPI ditetapkan sama dan mendukung penuh Visi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

B. MISI

MISI:

- Pengembangan Produk, Promosi Akses Pasar dan Kreatifitas
- Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sentra dan IKM
- Peningkatan Kemitraan IKM
- Penguatan Industri 4.0

1. Pengembangan Produk, Promosi Akses Pasar dan Kreatifitas

Pendidikan dan Pelatihan menjadi salah satu fokus program BPIPI dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Sebagai salah satu misi utama organisasi, pendidikan dan pelatihan yang diberikan BPIPI. Saat ini BPIPI sudah menyusun kurikulum dan silabus pelatihan untuk desain, pecah pola, teknologi produksi, manajemen produksi, jahit Alas Kaki "upper" dan lean manufacture. Kedepan masih sangat memungkinkan adanya perbaikan dan perbaruan kurikulum sesuai standard industri. Melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan BPIPI juga melakukan pendampingan terhadap industri kecil dan menengah sektor alas kaki.

2. Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha

Program konsultasi ini terkait dengan tugas dan fungsi pokok pembinaan industri persepatuan. Tidak hanya terbatas pada konsultasi teknis, tim BPIPI dengan kompetensi masing-masing juga memberikan konsultasi manajemen kepada industri, terutama manajemen produksi.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sentra dan IKM

Salah satu program organisasi kedepan ialah, bagaimana menyiapkan database design dengan didukung piranti hardware dan software sebagai salah satu referensi model dan desain untuk Alas Kaki casual (berbahan kulit) di Indonesia.

4. Peningkatan Kemitraan IKM

Sebagai salah satu tugas penting lembaga pelayanan ialah menyediakan informasi yang cukup mengenai perkembangan standard industri, teknologi produksi, kondisi pasar, desain terbaru dan informasi perdagangan dengan tujuan membantu percepatan penyampaian informasi. Untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap pelayanan uji produk, maka BPIPI memberikan jasa layanan tes uji laboratorium untuk produk Alas Kaki. Pelayanan uji ini penting untuk peningkatan kualitas dan pelaksanaan standard produk Alas Kaki.

5. Penguatan Industri 4.0

Tranformasi digital di masa depan menuntut kompetensi organisasi dan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. BPIPI akan memposisikan sebagai fasilitator jejaring bagi industri alas kaki untuk memperkuat ekosistem industri. Berbagai kolaborasi program, advokasi dan kegiatan di upayakan terus difasilitasi oleh BPIPI.

C. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“Meningkatnya peran IKM Alas Kaki dalam ekosistem industri pada Perekonomian Nasional”

Dengan indikator Tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Tujuan Organisasi

| Program Kegiatan | Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK | Satuan | Target Awal | | | | |
|---|---|---|-------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TJ Meningkatkan Peran IKM Alas Kaki dalam ekosistem industri pada Perekonomian Nasional | | | | | | | |
| | 1 | Pertumbuhan Industri Alas Kaki dan industri kulit | -8,6 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8 |

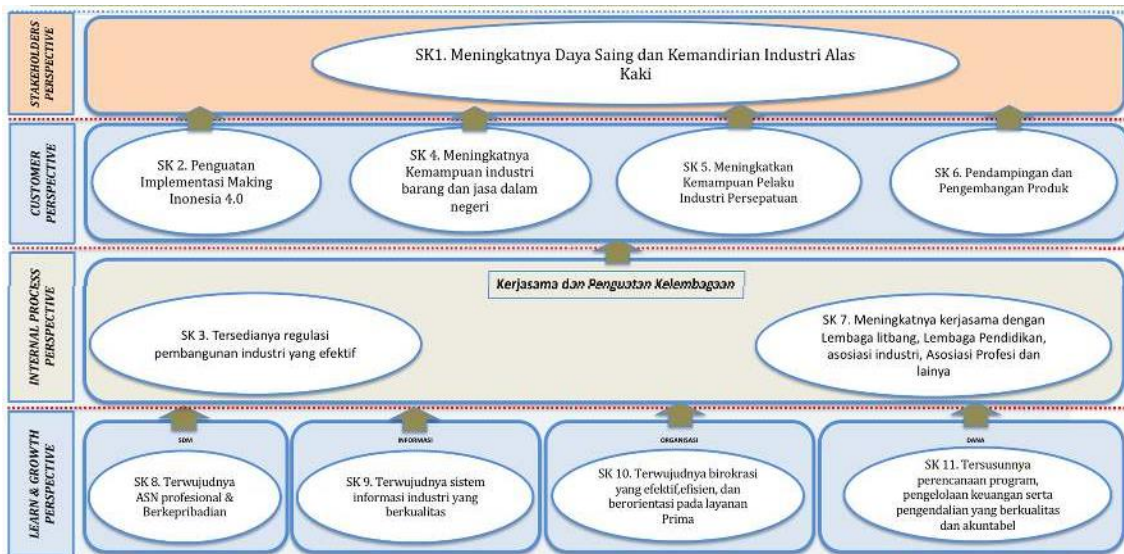
Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BPIPI

| Program Kegiatan | Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK | Satuan | Target Awal | | | | |
|---|---|---|-------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 1 Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Alas Kaki | | | | | | | |
| | 1 | Meningkatnya kontribusi nilai produksi IKM yang dibina BPIPI | 0,7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 | Meningkatnya kontribusi nilai penjualan IKM yang dibina BPIPI | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| | 3 | Proporsi Nilai tambah IKM Alas Kaki terhadap IKM Nasional | 30 | 65 | 105 | 150 | 200 |
| SK.6 Peningkatan dan Pengembangan Produk | | | | | | | |
| | 1 | Pengembangan Produk yang dimanfaatkan oleh IKM | 7 | 15 | 24 | 34 | 45 |

D. SASARAN STRATEGIS

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Pada peta strategi BPIPI dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program, dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator kinerja BPIPI

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| Program Kegiatan | Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK | Satuan | Target Awa | | | | | |
|------------------|---|--|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1 | Meningkatnya kontribusi nilai produksi IKM yang dibina BPIPI | Persen | 0,7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | Meningkatnya kontribusi nilai penjualan IKM yang dibina BPIPI | Persen | 0,7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3 | Proporsi Nilai tambah IKM Alas Kaki terhadap IKM Nasional | Persen | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| | 4 | IKM alas kaki yang mendapatkan ijin usaha | IKM (kumulatif) | 30 | 65 | 105 | 150 | 200 |
| | 1 | Nilai Indi IKM yang dibina BPIPI | Point | 1 | 1,2 | 1,22 | 1,24 | 1,26 |
| | 2 | Tumbuhnya IKM start up berbasis Teknologi | IKM (Kumulatif) | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| | 1 | Efektifitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPIPI | Persen | 0 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| | 1 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPIPI | Persen | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| | 1 | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi | IKM (Kumulatif) | 500 | 1050 | 1070 | 1100 | 1140 |
| | 2 | IKM Persepatuan yang melakukan kemitraan | IKM (Kumulatif) | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 |
| | 1 | Pengembangan Produk yang dimanfaatkan oleh IKM | Produk (Kumulatif) | 7 | 15 | 24 | 34 | 45 |
| | 1 | Jumlah Kerjasama Teknis yang baru maupun yang tindak lanjut | KS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1 | Rata - rata indeks profesionalitas ASN BPIPI | Indeks | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| | 1 | Nilai indi 4.0 BPIPI | Indeks | 0 | 0 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| | 1 | Tingkat Penyerapan Anggaran | Persen | 95 | 95,5 | 95,9 | 96,1 | 96,5 |
| | 2 | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) BPIPI | Indeks | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 |
| | 1 | Nilai SAKIP BPIPI | Nilai | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |

SK.1 Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian industri Aneka

Sasaran Strategis ini akan dicapai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi nilai produksi IKM yang dibina BPIPI, dimana padatahun 2020 mentargetkan 0,7% danmenjadi 5 %tahun 2024
2. Meningkatkan kontribusi nilai penjualan yang dibina oleh BPIPI, dimana pada tahun 2020 mentargetkan sebanyak 0,7% dan meningkat menjadi 26% tahun2024
3. IKM kulit , barang jadi kulit dan alas kaki yang mendapatkan ijin usaha, dimana pada tahun 2020 mentargetkan sebanyak 30 IKM dan meningkat menjadi 200 IKM tahun 2024 dihitung komulatif

SK.2 Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 disektor Industri alas kaki dan produk kulit

Sasaran Strategis ini akan dicapai dengan indicator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Indi IKM alas kaki/produk kulit, dimana pada tahun 2020 mentargetkan nilai 1 dan

meningkat menjadi 1,26 pada tahun 2024

2. Tumbuhnya IKM start Up berbasis teknolog, dimana pada tahun 2020 mentargetkan sebanyak 3 dan meningkat menjadi 125 tahun 2024 dihitung komulatif

SK. 3 Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif

Sasaran strategis ini akan di capai dengan indicator sebagai berikut :

1. Efektifitas regulasi yang ditetapkan dilingkungan BPIPI, dimana pada tahun 2021 ditetapkan 71% dan meningkat menjadi 77% tahun 2024

SK.4 Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

Sasaran strategis ini akan dicapai dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa BPIPI, dimana pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50% dan meningkat menjadi 53% tahun 2024

SK.5 Meningkatnya kemampuan pelaku industri persepatuan

Sasaran Strategis ini akan dicapai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sertifikat kompetensi, dimana pada tahun 2020 mentargetkan 500 orang dan meningkat menjadi 1140 orang tahun 2024 dihitung secara komulatif
2. IKM persepatuan yang melakukan kemitraan, dimana pada tahun 2022 mentargetkan 5 ikm dan naik sebesar 21 ikm pada tahun 2024.

SK.6 Pendampingan dan Pemberdayaan Produk

Sasaran Strategis ini akan dicapai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Hasil Pemberdayaan yang digunakan oleh IKM, dimana pada tahun 2020 mentargetkan 7 IKM dan meningkat menjadi 45 IKM tahun 2024 dihitung secara komulatif

SK.7 Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi dan lainnya

Sasaran Strategis ini akan dicapai dengan indicator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah kerjasama teknis BPIPI, dimana pada tahun 2020 mentargetkan 10 Kerjasama dan meningkat menjadi 14 Kerjasama tahun 2024

SK.8 Terwujudnya ASN professional & berkepribadian

Sasaran startegis ini akan di capai dengan indicator kinerja sebagai berikut:

1. Rata – rata indeks profesionalitas ASN BPIPI, dimana pada tahun 2021 metargetkan sebanyak 50% dan meningkat sebanyak 53% pada tahun 2024

SK.9 Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas

Sasaran startegis ini akan di capai dengan indicator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai indi 4.0 BPIPI

SK.10 Terwujudnyabirokrasi BPIPI yang efektif,efisien,danberorientasi pada layanan prima

Sasaran Strategis ini akan dicapai dengan indicator kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat Penyerapan Anggaran Jumlah tenaga kerja yang dimana pada tahun 2020 mentargetkan 95% dan meningkat menjadi 96,5% tahun 2024
2. Nilai IKM BPIPI dimana pada tahun 2020 mentargetkan indeks 3,55 dan meningkat menjadi 3,75 orang tahun 2024

SS.11 Tersusunya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas danakuntabel

Sasaran Strategis ini akan dicapai dengan indicator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana pada tahun 2020 mentargetkan nilai 77 dan meningkat menjadi 81 tahun 2024

Dalam menjalankan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja didukung beberapa program – program kegiatan BPIPI, diantaranya :

1. Pendampingan Teknis dan Manajemen
2. Desain dan Pengembangan Produk
3. Indonesia Footwear Creative Competition (IFCC)

4. Indonesia Footwear Network
5. Big Data dalam rangka Pemberdayaan industri alas kaki
6. Sertifikasi Profesi
7. Pemberdayaan SDM
8. Pelayanan Publik
9. Pelayanan Internal
10. Penumbuhan IKM
11. Pemberdayaan Standardisasi produk
12. Kolaborasi dan jejaring antar stakeholder
13. Penilaian indi 4.0 untuk IKM
14. Inkubator bisnis Teknologi
15. Kegiatan internal BPIPI (Kepegawaian, indi 4.0 BPIPI, Training)

E. PLATFORM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara penyusunan RPJM Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan maka setiap unit kerja/satuan kerja diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis jangka waktu 5 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) menyusun Rencana Strategis untuk menangkap peluang perubahan yang terjadi pada sektor manufaktur industri alas kaki khususnya IKM. Ragam perubahan media teknologi dan informasi menjadikan peta industri alas kaki mengalami pergeseran. IKM alas kaki saat ini harus punya orientasi penggunaan Internet of Things (IoT) pada setiap rantai nilai bisnisnya. Perubahan ini menjawab tantangan ke depan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian yang telah menyusun inisiasi "Making Indonesia 4.0" sebagai implementasi peta jalan Indonesia menuju revolusi industri 4.0.

Fokus Periode 2020 - 2024

1. Pendampingan IKM

Pendampingan IKM terintegrasi untuk memaksimalkan peningkatan dan fasilitasi IKM yang ada di Indonesia. Layanan bimbingan teknis BPIPI akan menitikberatkan pada output SDM yang mampu menghasilkan ide-ide produk dan pendukungnya yang berbasis kreatifitas melalui kegiatan start up, inkubasi dan pendampingan langsung ke sentra potensial

2. Pengembangan Produk

- BPIPI akan menyediakan desain/purwarupa alas kaki yang merupakan hasil kajian/kolaborasi/Pemberdayaan budaya lokal untuk mengisi pasar domestik dan global
- BPIPI akan fokus pada program perekayasaan teknologi dan proses produksi
- BPIPI akan berperan dan fokus pada sebagai knowledge development manager dengan mengarahkan pengetahuan yang dimiliki industri alas kaki sesuai dengan kebutuhan

3. Kemitraan

BPIPI mendukung kemitraan dimana dalam konteks bisnis, kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan dapat bersifat formal atau informal, dan dapat mencakup berbagai bentuk kerjasama, termasuk pemasaran bersama , pengembangan produk, distribusi dan penyediaan layanan.BPIPI membangun kemitraan untuk membantu IKM mencapai tujuan mereka dengan memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing – masing mitra. Kemitraan juga membantu perusahaan untuk memperluas pasara mereka dan memperkuat posisi mereka di pasar yang sudah ada.

4. Kreativitas

Menjadi focus BPIPI karena BPIPI ingin menciptakan lingkungan yang mendorong kegiatan kreatifitas seperti kebebasan dalam bereksplorasi, kolaborasi, dan umpan balik yang konstruktif. Dengan kreatifitas yang ditumbuhkan diharapkan dapat mengembangkan solusi inovatif pada industry terutama industri alas kaki

5. Penumbuhan wirausaha

Penumbuhan wirausaha menjadi focus BPIPI untuk peningkatan bisnis IKM alas kaki. Dalam menumbuhkan wirausaha BPIPI mempunyai output menjadikan industri lebih mandiri dan berkembang. Salah satu usaha BPIPI adalah dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan industri, memperluas pasar, pengembangan kemitraan, peningkatan efisiensi dan produktivitas serta meningkatkan kemampuan manajerial.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA








Arah kebijakan penumbuhan dan Pemberdayaan industri kecil, menengah, dan aneka 5 (lima) tahun ke depan tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan industri nasional yang tertuang dalam RIPIN, RPJMN 2020-2024, KIN 2020-2024, Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 dan dan kebijakan lainnya yang terkait. RPJMN 2020-2024 juga merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu “Indonesia Maju “. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Indonesia 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik seperti pada Gambar berikut:



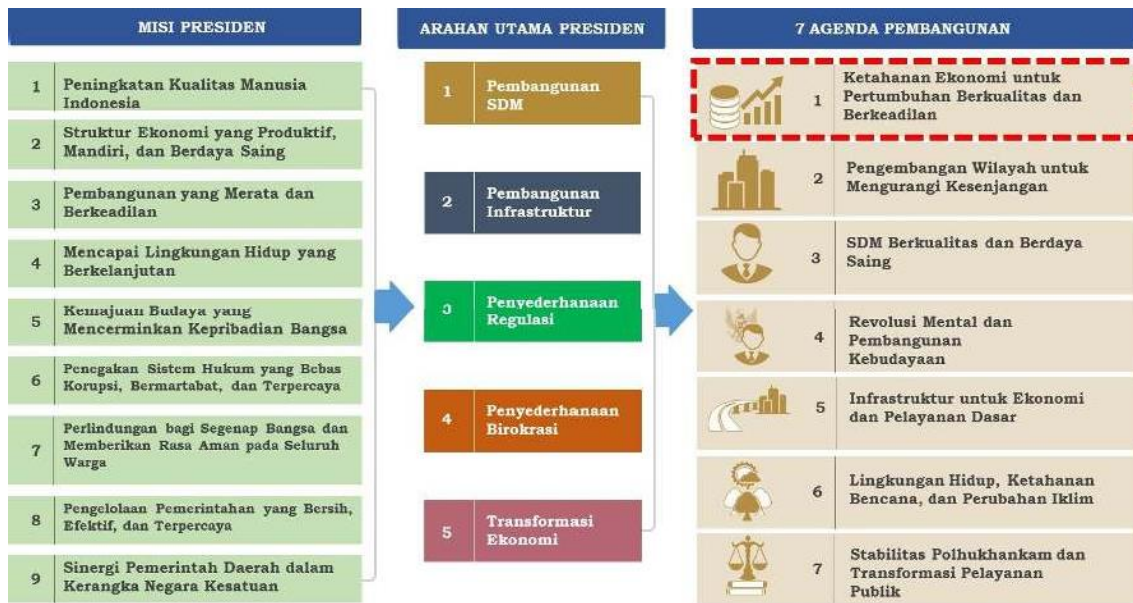


Gambar 3.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

Sehingga dapat dirumuskan visi misi Presiden, arahan Presiden dan 7 agenda pembangunan Indonesia dalam kerangka pembangunan RPJMN 2020-2024 seperti pada Gambar 3.5 berikut:

| 7 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024 | | |
|---|---|---|
|  | 1 | Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan |
|  | 2 | Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan |
|  | 3 | Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing |
|  | 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan |
|  | 5 | Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar |
|  | 6 | Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |
|  | 7 | Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |

Gambar 3.2 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional



Gambar 3.3 Kerangka Pembangunan RPJMN 2020 – 2024

Visi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”



Gambar 3.4 Gambaran Pertumbuhan 2020 – 2024
(Rata – rata Pertumbuhan Tahun 2020 – 2024 (persen/Tahun)

Pada Gambar 3 di atas, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang merupakan rumusan prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 dan salah satu yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang juga merupakan Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Dengan demikian, isu strategis Prioritas Nasional yang terkait industri yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan seperti pada Gambar 3 berikut:

Ket: PP 5 s/d PP8 terkait dengan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka



Gambar 3.5 Isu Strategis Prioritas Nasional 1 : Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Berdasarkan isi strategis tersebut di atas, maka terdapat 8 (delapan) Program Prioritas (PP) dalam Prioritas Nasional 1 (PN 1), termasuk diantaranya yang terkait dengan industri kecil, menengah, dan aneka yaitu PP 5 sampai dengan PP 8, seperti pada Gambar 3.5 berikut:


Gambar 3.6 Prioritas Nasional1 (PN1) Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

| | |
|------|---|
| PP 1 | Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) |
| PP 2 | Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi |
| PP 3 | Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan |
| PP 4 | Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan |
| PP 5 | Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi |
| PP 6 | Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi |
| PP 7 | Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) |
| PP 8 | Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi |


Dengan indikator dan target pembangunan industri dalam RPJMN 2020-2024 dan yang terkait dengan industri kecil, menengah, dan aneka (diberi tanda merah) seperti pada berikut:

| Proyek Prioritas | Indikator | Target | |
|--|--|-----------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2024 |
| <p>5</p>  <p>Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi</p> <p>Keterangan: Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs</p> <p>a) Sakernas Agustus tahun 2019, diolah. b) Capaian tahun 2018; c) Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019; d) Target 2019</p> | 1 Rasio kewirausahaan nasional | 3,3% ^{a)} | 3,9% |
| | 2 Kontribusi UMKK terhadap PDB | 57,2% ^{b)} | 65% |
| | 3 Proporsi Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan | 8,1% ^{b)} | 11% |
| | 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM (9.3.2*) | 19,7% ^{c)} | 22% |
| | 5 Pertumbuhan wirausaha | 1,7% ^{a)} | 4% |
| | 6 Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi | 22 sentra (kumulatif) | 30 sentra (kumulatif) |
| | 7 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas (9.3.1*) | 18,5% | 20% |
| | 8 Kontribusi usaha sosial | 1,9% PDB | 2,5% PDB |
| | 9 Nilai penyaluran KUR | Rp 140 Triliun | Rp 325 Triliun |
| | 10 Peningkatan <i>start-up</i> ^{h)} | 748 unit | 3.500 unit (kumulatif) |

Gambar 3.7 Indikator dan Target Pembangunan Industri dalam RPJMN 2020-2024
Program Prioritas: Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi

| | Indikator | Target | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2024 | |
|  <p>Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (1/2)</p> | 1 | Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) | 3,9% ^{c)} | 8,1% |
| | 2 | Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas | 4,5% ^{c)} | 8,4% |
| | 3 | Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) | 19,9% ^{b)} | 21,0% |
| | 4 | Kontribusi PDB industri pengolahan non migas | 17,6% ^{b)} | 18,9% |
| | 5 | Jumlah tenaga kerja industri pengolahan | 18,9 juta orang ^{a)} | 22,5 juta orang |
| | 6 | Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) | 14,9% ^{a)} | 15,7% |
| | 7 | Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan | Rp 198,0 triliun ^{d)} | Rp 782,0 triliun |
| | 8 | Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi | 8 KI (kumulatif) | 9 KI (kumulatif) |
| | 9 | Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan | 15 KI (kumulatif) | 18 KI (kumulatif) |
| | 10 | Fasilitasi Kawasan industri dengan zona tematik: industri halal | N/A | 3 kawasan (kumulatif) |
| | 11 | Persentase SNI bidang industri yang diterapkan | 3% | 20% |

Gambar 3.8 Indikator dan Target Pembangunan Industri dalam RPJMN 2020-2024

| | Indikator | Target | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2024 |
|  <p>Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (1/2)</p> | 1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) | 3,9% ^{c)} | 8,1% |
| | 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas | 4,5% ^{c)} | 8,4% |
| | 3. Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) | 19,9% ^{b)} | 21,0% |
| | 4. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas | 17,6% ^{b)} | 18,9% |
| | 5. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan | 18,9 juta orang ^{a)} | 22,5 juta orang |
| | 6. Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) | 14,9% ^{a)} | 15,7% |
| | 7. Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan | Rp 198,0 triliun ^{d)} | Rp 782,0 triliun |
| | 8. Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi | 8 KI (kumulatif) | 9 KI (kumulatif) |
| | 9. Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan | 15 KI (kumulatif) | 18 KI (kumulatif) |
| | 10. Fasilitasi Kawasan industri dengan zona tematik: industri halal | N/A | 3 kawasan (kumulatif) |
| | 11. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan | 3% | 20% |

Gambar 3.9 Program Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi

| Proyek Prioritas | Indikator | Target | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| | | 2019 | 2024 |
|  <p>Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</p> | 1. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan | -3,6% ^{a) b)} | 10,1% |
| | 2. Nilai ekspor produk industri pengolahan | USD 115,7 miliar ^{a) b)} | USD 183,4 miliar |
| | 3. Kontribusi ekspor produk industri yang berteknologi tinggi (9B.1) | 10,7% ^{c) d)} | 13,0% |
| | 4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) | 43,3% | 50% |
| | 5. Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku | 6.097 produk | 8.400 produk |

Gambar 3.9 Indikator dan Target Pembangunan Industri dalam RPJMN 2020-2024 Program Prioritas: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN)

| Proyek Prioritas | Indikator | Target | |
|--|--|---------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2024 |
|  <p>8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi</p> | 1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 | 24 perusahaan | 60 perusahaan (kumulatif) |
| | 2 Jumlah perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) | 28 perusahaan | 71 perusahaan |

Gambar 3.10 Indikator dan Target Pembangunan Industri dalam RPJMN 2020-2024 Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Program Prioritas tersebut di atas dijabarkan lebih rinci kedalam Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas termasuk yang terkait dengan industri kecil, menengah dan aneka seperti pada Gambar berikut:

| PP 5 Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi | |
|---|---|
| <p>KP 1 Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk • Penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha | <p>KP 4 Peningkatan penciptaan peluang usaha dan start-up</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kewirausahaan • Inkubasi usaha • Penguatan kapasitas layanan usaha • Pengembangan sentra IKM • Penyediaan insentif fiskal |
| <p>KP 2 Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor • Penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha • Pendampingan mengakses kredit/pembiayaan | <p>KP 5 Peningkatan nilai tambah usaha sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan akses permodalan • Pengembangan <i>impact investment</i> • Peningkatan kapasitas • Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah |
| <p>KP 3 Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi • Pendampingan kelompok untuk berkoperasi • Pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi • Pengembangan inovasi koperasi | |

Ket: KP (Kegiatan Prioritas)

Gambar 3.11 Kegiatan-Kegiatan Prioritas Dalam Program Prioritas 5 (PP 5): Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi

| PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | |
|--|--|
| <p>KP 1 Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan, pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas Harmonisasi kebijakan dan pengembangan pemasok Diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri Pengembangan permesinan untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesin industri dan perluasan aktivitas Penguatan infrastruktur pendukung industri Penerapan manajemen industri modern Penguatan <i>circular economy</i> Penyediaan insentif | <p>KP 4 Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan dan inkubasi Pengembangan <i>center of excellence</i> Fasilitasi inovasi dan penguatan brand Ruang/kluster kreatif dan <i>Creatif District</i> Penerapan dan komersialisasi HKI Penguatan rantai pasok dan skala usaha kreatif |
| <p>KP 2 Peningkatan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sarana penunjang dan akses energi Fasilitasi perizinan dan penguatan investasi Penyiapan SDM terampil Penyusunan RRTR/RDTR di sekitar KI | <p>KP 5 Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antarsektor dan wilayah Fasilitasi dan kemudahan berusaha dan investasi Reformasi ketenagakerjaan Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN |
| <p>KP 3 Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan aksesibilitas, amenitas dan atraksi, serta daya dukung Penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata Pengelolaan destinasi dan standar layanan Penataan kota sebagai <i>service hub</i> pariwisata | <p>KP 6 Pengembangan industri halal</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan industri halal Pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah Rencana Induk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah rencana induk ekonomi dan keuangan syariah Perlindungan konsumen dan tertib niaga |

Gambar 3.12 Kegiatan-Kegiatan Prioritas Dalam Program Prioritas 6 (PP 6): Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi

| PP 7 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | |
|--|--|
| <p>KP 1 Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Peningkatan ekspor jasa Penguatan platform informasi ekspor dan impor Pengembangan <i>marketplace</i> ekspor Peningkatan daya saing brand | <p>KP 5 Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemudahan impor untuk tujuan ekspor Fasilitasi kerja sama investasi <i>inbound</i> dan <i>outbound</i> |
| <p>KP 2 Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan pembiayaan ekspor Penguatan skema kerja sama <i>business-to-business</i> Perluasan pasar ekspor | <p>KP 6 Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Inovasi dan keterpaduan pemasaran Penguatan perwakilan pariwisata Penguatan <i>nation branding</i> Perayaan terhadap warisan alam, budaya dan keragaman Diplomasi gastronomi |
| <p>KP 3 Pengelolaan impor</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pemasok komponen Peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri Promosi pariwisata dan kemudahan akses perjalanan di dalam negeri | <p>KP 7 Peningkatan efektivitas <i>Preferential Trade Agreement (PTA)</i>/ <i>Free Trade Agreement (FTA)</i>/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> dan diplomasi ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perluasan keanggotaan dan partisipasi aktif di organisasi dan inisiatif internasional Reformasi tata kelola dan kebijakan pemerintahan untuk pelaksanaan komitmen |
| <p>KP 4 Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> Sinergi pengembangan pemasok Peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri | |

Gambar 3.13 Kegiatan-Kegiatan Prioritas Dalam Program Prioritas 7 (PP 7): Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)



Gambar 3.14 Kegiatan-Kegiatan Prioritas Dalam Program Prioritas 8 (PP 8): Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Selain itu, ditengah perkembangan era digital dan memasuki era 4.0, terdapat sub sektor prioritas industri 4.0 seperti pada Gambar berikut:

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Latar Belakang | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai kontribusi PDB industri menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% lebih rendah dari pertumbuhan nasional. • Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju yang lebih lambat dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara lain • Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah. • Potensi pemanfaatan teknologi digital sangat besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri berbasis konten. | | | | | |
| Manfaat | Meningkatnya pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 8,1 persen Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam PDB menjadi 21,0 persen Meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan menjadi USD 183,4 miliar | | | Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi menjadi 13 persen Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) \geq 3.0 menjadi 60 perusahaan (kumulatif) | | |
| Durasi | 2020-2024 (5 tahun) | | | | | |
| | INDIKASI TARGET | | | | | INDIKASI PENDANAAN |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Indikasi Target dan Pendanaan | Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,7% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,0% | Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,8% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,5% | Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 6,5% | Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20,4% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 7,5% | Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 21% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 8,1% | Rp 245,8 T • APBN: Rp 13 T • Swasta: Rp 106,9 T • BUMN: Rp 125,9 T |
| Pelaksana | Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkominfo, Kemenristek, Kemenparekraf, KemenKUKM, KemenKP, Kemendag, KPPU, KemenLHK, K/L lainnya (Sesuai Making Indonesia 4.0: KemenPUPR, KemenESDM, Kementan, Bappenas, BKPM, Kemenaker dan Kemendagri), Pemda, Dunia Usaha | | | | | |
| Highlight Proyek | 1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan (Kemenperin, Kemendag, KPPU, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas) 2. Perbaikan alur aliran material dan penerapan standar keberlanjutan (Kemenperin, KemenKP, Kemendag, KemenLHK, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu) 3. Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi (Kemenristek, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenparekraf, KemenKP, KemenLHK, KemenKUKM, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu) 4. Peningkatan investasi (BKPM, Kemenperin, Kemenko Perekonomian) 5. Pemberdayaan UMKM (Kemenperin, KemenKUKM, Kemenparekraf) | | | | | |

Gambar 3.15 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi

Selain RPJMN 2020-2024 tersebut di atas, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian juga sedang menyusun Rancangan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesiamenjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB sebagaimana terlampir pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 3.16 Aspirasi Making Indonesia 4.0

B. STRATEGI, SASARAN SERTA PROGRAM PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN IKM

Penumbuhan dan Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dalam lima tahun ke depan sejalan dengan pembangunan industri nasional yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan non migas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Sektor industri pengolahan non migas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018.

Pemberdayaan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. Industri Pangan (Makanan dan Minuman);
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT;
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;

8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman;
2. Industri Tekstil dan Busana;
3. Industri Otomotif;
4. Industri Kimia; dan
5. Industri Elektronika.

Didalam konsep Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 juga akan ditetapkan industri-industri prioritas yang lebih mengerucut dan fokus Pemberdayaannya. Selain itu juga terdapat kebijakan- kebijakan yaitu (i) Pemberdayaan sumber daya industri (pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, Pemberdayaan dan pemanfaatan teknologi industri, Pemberdayaan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan), (ii) kebijakan Pemberdayaan sarana dan prasarana industri (Pemberdayaan standarisasi industri, Pemberdayaan infrastruktur industri, dan Pemberdayaan sistem informasi industri nasional), (iii) kebijakan pemberdayaan industri (Pemberdayaan industri kecil dan menengah, Pemberdayaan industri hijau, Pemberdayaan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan kerjasama internasional di bidang industri), (iv) kebijakan Pemberdayaan perwilayahan industri, (v) kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal, serta (vi) kebijakan reformasi birokrasi.

1. Strategi Penumbuhan dan Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mendukung 6 (enam) kebijakan tersebut diatas, namun secara khusus yang terkait dengan industri kecil, menengah, dan aneka adalah melaksanakan kebijakan

pemberdayaan industri (Pemberdayaan industri kecil dan menengah).

Industri Kecil dan Menengah telah menjadi kunci peningkatan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya nilai tambah usaha, lemahnya kompetensi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja IKM, kurangnya dukungan aspek kelembagaan formal (ijin usaha, sertifikasi, kolateral, dll.) serta kurangnya dukungan pembiayaan bagi IKM.

Tumbuhnya IKM perlu didukung oleh ekosistem bisnis yang kondusif dari sisi regulasi (insentif, perizinan dan perlindungan usaha), pembiayaan (inovasi sumber pembiayaan alternatif, penyederhanaan persyaratan dan prosedur pengajuan, kecepatan pelayanan dan sosialisasi), Pemberdayaan pasar (business matching, e-smart IKM, layanan ekspor terpadu, serta kemitraan sentra IKM dan industri besar).

Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas IKM di era ekonomi digital saat ini dapat dicapai dengan berbagai cara antara lain melalui pemanfaatan platform digital (e-commerce), inovasi pembiayaan melalui financial technology (fintech), kolaborasi rantai pasok, sertifikasi dan standardisasi produk, serta Pemberdayaan produk termasuk fasilitasi halal bagi IKM.

Sebagai langkah operasional dalam mewujudkan Industri kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam merumuskan kebijakan prioritas Pemberdayaan IKM perlu mempertimbangkan aspek sumber daya industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, perkembangan ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka Penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan Pemberdayaan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan.

Selanjutnya Pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk peningkatan kompetensi

sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, bantuan dan bimbingan teknis, bantuan Bahan Baku dan bahan penolong, bantuan mesin atau peralatan, Pemberdayaan produk, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau, bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran, akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha serta penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan, dan Pemberdayaan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas.

Sebagai salah satu bahan pedoman bagi Pembina Industri, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang didalamnya terdapat penjelasan lebih rinci mengenai penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah, kerjasama maupun pemberian fasilitas

Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan, program Pemberdayaan IKM pada dalam rangka menghadapi era industri 4.0 difokuskan pada dua aspek utama:

- (1) Peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan e- business dalam rangka efisiensi proses bisnis, standardisasi produk dan sertifikasi kompetensi keahlian, konsultasi bisnis dan Pemberdayaan produk, digitalisasi IKM (aspek internal)
- (2) Pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif dan mendukung pemberdayaan melalui layanan Pemberdayaan usaha yang komprehensif (aspek eksternal).

2. Sasaran Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

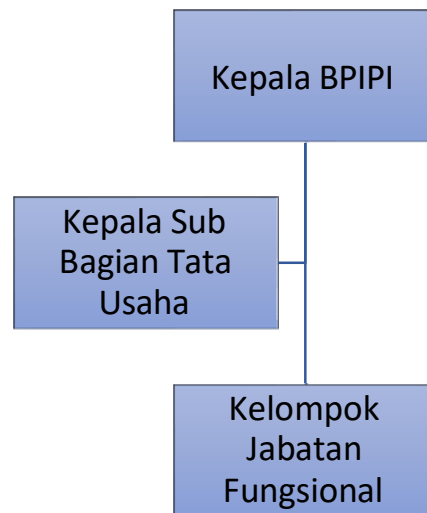
Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah adalah sebagaiberikut:

- a. Meningkatnya kompetensi internal IKM di era Industri 4.0, yaitu efisiensi proses bisnis, perijinan, peningkatan kualitas produk dan kompetensi tenaga kerja, dengan diterapkannya e-business oleh 1000 IKM, serta terbentuknya platform pusat bantuan IKM (help center) yang memberikan pelayanan standardisasi produk, perijinan, dan sertifikasi kompetensi;
- b. Terlaksananya pendampingan dan konsultasi IKM yang melibatkan berbagai pihak antara lain konsultan industri, perguruan tinggi, mahasiswa, atau lembaga diklat K/L;
- c. Meningkatnya aktivitas Pemberdayaan produk IKM digital melalui kompetisi start-up berbasis teknologi minimal 1 kali per tahun yang menghasilkan 15 inovasi produk digital atau 15 start-up IKM berbasis teknologi;
- d. Tersusunnya regulasi insentif dan sumber pembiayaan bagi IKM yang mengatur jenis, besaran, serta persyaratan IKM yang memperoleh insentif dan pembiayaan;
- e. Terbentuknya layanan terpadu satu pintu bagi IKM berorientasi ekspor;
- f. Terbangunnya skema kemitraan antara sentra IKM dan industri besar;
- g. Peningkatan skala keekonomian melalui pembangunan infrastruktur sentra IKM seperti fasilitas penyimpanan dan pengemasan terpadu;
- h. Terlaksananya penguatan kelembagaan (sentra, UPT, TPL, konsultan) dan pemberian fasilitas untuk IKM lainnya.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang langsung dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian cq Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan level struktur

organisasi eselon III.



Gambar 3.17 Struktur Organisasi BPIPI

Tugas Pokok masing-masing bagian/unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPIPI
Mengemban tugas memimpin Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia dalam hal perumusan Pemberdayaan organisasi, pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan BPIPI.
2. Subbag Tata Usaha
Mengemban tugas pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, tumah tangga, kordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan perpustakaan BPIPI.
3. Disamping itu terdapat kelompok fungsional yang mengemban tugas memberikan dukungan teknis untuk semua pelaksanaan operasional organisasi sesuai kompetensi yang dimiliki.

STRATEGI KEBIJAKAN PERIODE 2020-2024

Pada periode 2020-2024, BPIPI membangun pondasi sebagai lembaga berstandar global dalam menyediakan layanan untuk industri alas kaki. Pada periode ini penguatan aspek internal dilakukan untuk menciptakan keunikan produk/output, proses, Pemberdayaan desain dan optimalisasi pengetahuan. Aspek kreatifitas akan menjadi kata kunci Pemberdayaan BPIPI 2020-2024. Sesuai dengan desain Pemberdayaan organisasi, maka pada periode ini peran BPIPI sebagai pusat pemberdayaan industri alas kaki yang berkontribusi pada Pemberdayaan industri alas kaki nasional.

Tabel 3.1 Strategi Kebijakan Periode 2020 - 2024

| Aspek 1 : SDM | SDM Utama |
|--------------------------|---|
| Pembelajaran, SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Pada periode ini, materi pembelajaran mengarah pada Pemberdayaan kreatifitas pada aspek produk dan proses produksi. • Personil yang kreatif untuk mengembangkan tata kelola organisasi yang fleksibel dan produktifitas tinggi • Personil mampu mengadaptasi platform IoT dalam aspek SDM |
| Pemberdayaan Produk | <ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi dengan brand lokal, <i>influencer media</i>, desainer fashion akan menjadi bagian penting dalam proses menghasilkan desain alas kaki. • Personil (art graphic designer) yang memiliki kemampuan seni sekaligus mampu mengadatasi kemampuan visual 3 dimensi melalui 3D printing |
| Optimalisasi Pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan riset material/bahan dan desain yang mampu mendorong kreatifitas desain. • Peran pengelola media sosial dan informasi menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi BPIPI sebagai sumber data, informasi dan rujukan utama industri alas kaki |

| Aspek 2 : Organisasi | STRUKTUR – STRATEGI – SISTEM (3S) SHARE VALUE – STAFF – STYLE – SKILL (4S) |
|----------------------|---|
| Pembelajaran, SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Pada periode ini BPIPI harus diperkuat fungsi hubungan masyarakat (humas) dengan berbagai pihak. • BPIPI terus konsisten mengkampanyekan budaya kerja industri global #BPIPIBerprestasi |
| Pemberdayaan Produk | <ul style="list-style-type: none"> • Produktifitas desain dan purwarupa harus didukung adanya struktur, strategi dan sistem yang akan menghubungkan BPIPI dengan pihak luar • Pada periode ini, budaya kreatif dikembangkan pada gaya kepemimpinan di seluruh area kerja. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Optimalisasi Pengatahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Dengan fungsi kehumasan, maka komunikasi internal dan eksternal yang dilakukan personil humas harus mengoptimalkan pengetahuan yang dikelola oleh organisasi. • Secara internal akan dikembangkan pengelolaan data kegiatan yang lebih rapi dan sistematis agar bisa dimanfaatkan bagi industri alas kaki (big data). |
|-----------------------------|--|

| Aspek 3 : Sarana & Sarana & Prasarana Prasaranana | |
|--|--|
| Pembelajaran, SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Pada periode ini, pemantapan aspek kreatifitas dalam Pemberdayaan modul belajar, kurikulum, ruang belajar dan media belajar yang menggunakan platform IoT • Peralatan teknis dengan penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari proses pembelaran SDM • Modernisasi sarana dan prasarana belajar • Modernisasi sarana dan prasaranan workshop yang terdiri dari mesin dan alat produksi alas kaki • Modernisasi sarana dan prasarana laboratorium uji alas kaki (kimia & fisik) |
| Pemberdayaan Produk | <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan desaian, printer 3D, moulding, dan CNC untuk pembuatan desain dan purwarupa. • Fasilitasi uji produk dan material (kimia & fisika) yang mendukung SNI dan standard global • Modernisasi laboratorium desain alas kaki dan rekayasa industri |
| Optimalisasi Pengatahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Melalui sarana dan prasarana yang ada pengetahuan yang dikelola oleh BPIPI harus “dijual” kepada industri |

| Aspek 4 : Anggaran Operasional dan Investasi | |
|---|--|
| Pembelajaran, SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran yang disediakan dikelola untuk penyelenggaran operasional program dan kegiatan, diprioritaskan untuk bimbingan teknis start up, tenant inkubator dan industri skala menengah kecil alas kaki • Anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan media belajar yang mendukung proses pembalajaran offline dan online (cloud computing) |
| Pemberdayaan Produk | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran digunakan untuk fokus pada pengolahan data dan produksi desain (<i>database information system desain</i>) • Anggaran untuk mendukung infrastruktur desain yang mendukung industri 4.0 |
| Optimalisasi Pengatahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk pengolahan dan publikasi data |

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BPIPI yang telah dijabarkan pada Bab III. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Dalam mencapai tujuan target kinerja, akan dijabarkan dalam indikator program dan indikator kegiatan yang kemudian akan dijabarkan setiap tahun dalam rencana kinerja BPIPI Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan seperti dapat dilihat pada berikut:

Tabel IV.1 Indikator Kinerja BPIPI dan Penanggungjawab

| Program Keputeran | Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/KUJK | Satuan | Target Awal | | | | | PIC |
|-------------------|--|--------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| TU | Meningkatnya Peran IKM Alas Kaki dalam ekosistem industri pada Perekonomian Nasional | | | | | | | |
| | 1 Pertumbuhan Industri Alas Kaki dan industri kulit | Persen | -8,6 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8 | |
| SK 1 | Meningkatnya Laya Saling dan Kemandirian Industri Alas Kaki | | | | | | | |
| | 1 Meningkatnya kontribusi nilai produksi IKM yang dibina BPIPI | Persen | 0,7 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bidang P2W |
| | 2 Meningkatnya kontribusi nilai penjualan IKM yang dibina BPIPI | Persen | 0,7 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bidang P2W |
| | 3 Proporsi Nilai tambah IKM Alas Kaki terhadap IKM Nasional | Persen | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | Bidang P2W |
| | 4 IKM alas kaki yang mendapatkan ijin usaha | IKM (kumulatif) | 30 | 65 | 105 | 150 | 200 | Bidang P2W |
| SK 2 | Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 | | | | | | | |
| | 1 Nilai Indri IKM yang dibina BPIPI | Point | 1 | 1,2 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | Bidang P3KI |
| | 2 Tumbuhnya IKM start up berbasis Teknologi | IKM (Kumulatif) | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 | Bidang P3KI |
| SK 3 | Tersedianya regulasi pembengunan industri yang efektif | | | | | | | |
| | 1 Efektifitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPIPI | Persen | 0 | 71 | 73 | 75 | 77 | TU |
| SK 4 | Meningkatnya Kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri | | | | | | | |
| | 1 Persentase nilai capaian penguasaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPIPI | Persen | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 | TU |
| SK 5 | Meningkatkan Kemampuan Peaku Industri Persepatuan | | | | | | | |
| | 1 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi | IKM (Kumulatif) | 500 | 1050 | 1070 | 1100 | 1140 | TU |
| | 2 IKM Persepatuan yang melakukan kemitraan | IKM (Kumulatif) | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | Bidang P3KI |
| SK 6 | Pendampingan dan Pengembangan Produk | | | | | | | |
| | 1 Pengembangan Produk yang dimanfaatkan oleh IKM | Produk (Kumulatif) | 7 | 15 | 24 | 34 | 45 | Bidang P3KI |
| SK 7 | Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga litbang, Lembaga Pendidikan, asosiasi industri, Asosiasi Profesi dan lainnya | | | | | | | |
| | 1 Jumlah Kerjasama Teknis yang baru maupun yang tindak lanjut | KS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bidang P3KI |
| SK 8 | Terwujudnya ASN profesional & Berkeambadan | | | | | | | |
| | 1 Rate - rate indeks profesionalitas ASN BPIPI | Indeks | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 | TU |
| SK 9 | Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas | | | | | | | |
| | 1 Nilai Indri 4.0 BPIPI | Indeks | 0 | 0 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | TU |
| SK 10 | Terwujudnya birokrasi yang efektif,efisien, dan berorientasi pada layanan Prima | | | | | | | |
| | 1 Tingkat Penyerapan Anggaran | Persen | 95 | 95,5 | 95,9 | 96,1 | 96,5 | TU |
| | 2 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) BPIPI | Indeks | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 | TU |
| SK 11 | Terususnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel | | | | | | | |
| | 1 Nilai SAKIP BPIPI | Nilai | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | TU |

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Anggaran yang digunakan hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Kerangka Anggaran 2020 – 2024

| Kerangka Pendanaan | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20.910.057.000 | 46.694.000.000 | 32.544.000.000 | 32.694.000.000 | 18.569.000.000 |

Rincian kerangka pendanaan terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan disusun untuk menjadi acuan bagi BPIPI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik, serta menjadi pedoman dalam mengukur tingkat kemampuan BPIPI yang berorientasi pada hasil yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan 5 tahunan.

Sesuai dengan semangat Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, BPIPI mempunyai program unggulan yaitu Penciptaan & Pemenuhan SDM industri alas kaki yang kompeten, Peningkatan mutu produk alas kaki dalam negeri, Inisiasi penciptaan wirausaha baru (start up) berbasis IoT, fasilitasi kegiatan kreatif, Peningkatan kualitas pelayanan.

Sesuai dengan tujuan dan komitmen bersama seluruh sumber daya organisasi BPIPI yaitu dalam upaya mewujudkan visi organisasi sebagai service excelent locus bagi industri alas kaki di Indonesia yang profesional dan berdaya saing global tidak dapat dielakkan merupakan sebuah mimpi bersama yang harus terwujud. Seluruh sumber daya organisasi yang terlibat didalamnya dituntut untuk siap dalam kondisi apapun untuk memberikan yang terbaik bagi kelangsungan organisasi

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (renstra K/L) tahun 2020 - 2024

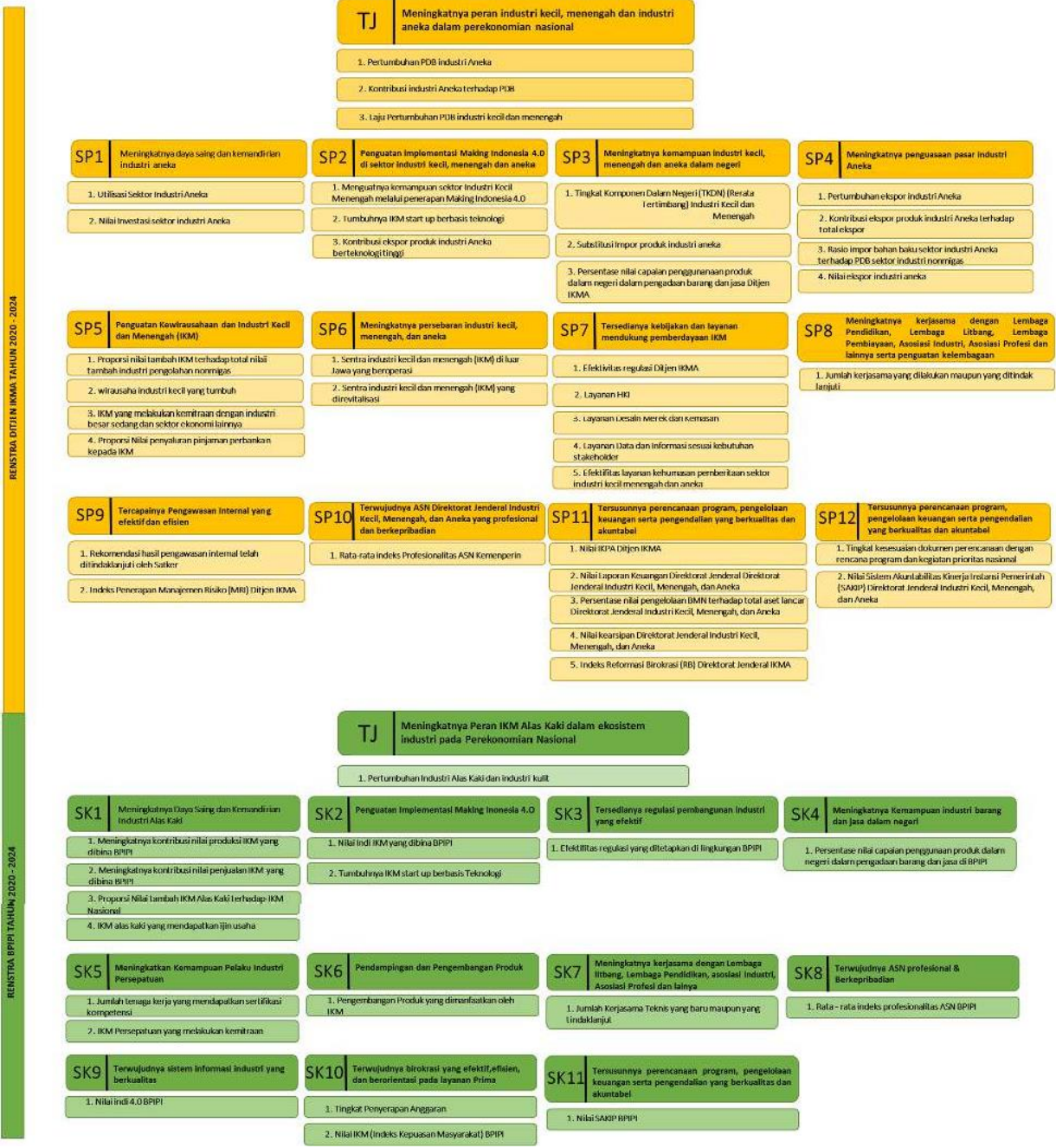
Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2021 - 2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 2020- 20124

Rencana Strategis Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia 2015 – 2019

Lampiran 1. Pohon Kinerja

Bagan I
Pohon Kinerja Renstra Ditjen IKMA 2020–2024



Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja

| Program/Kegiatan | Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKM/UKM | Satuan | Alokasi (dalam rupiah) | | | | | K/L dan Unit Terkait |
|---|--|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| TJ Meningkatkan Peran IKM Aneka Kaki dalam ekosistem industri pada Perekonomian Nasional | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan industri Aneka Kaki dan industri kulit | Persen | | | | | | |
| SK 1 Meningkatkan Daya Saing dan Kemudahan Industri Aneka Kaki | | | 18.117.430.000 | 11.785.597.000 | 32.810.889.000 | 45.191.973.000 | 16.711.165.000 | |
| 1 | Meningkatnya kontribusi nilai produksi IKM yang dibina BPIPI | Persen | 274.385.000 | 735.419.000 | 1.439.580.000 | 1.583.538.000 | 1.741.891.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| 2 | Meningkatnya kontribusi nilai penjualan IKM yang dibina BPIPI | Persen | 888.765.000 | 1.110.092.000 | 208.526.000 | 229.378.000 | 292.916.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| 3 | Proporsi Nilai Tambah IKM Aneka Kaki terhadap IKM Nasional | Persen | 0 | 0 | 450.858.000 | 495.943.000 | 545.587.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| 4 | IKM aneeka kaki yang mendapatkan Ijin Usaha | IKM (kumulatif) | 519.910.000 | 664.146.000 | 446.961.000 | 491.657.000 | 540.822.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Ind. IKM yang dibina BPIPI | Point | 88.710.000 | 364.420.000 | 142.156.000 | 156.371.000 | 172.008.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| 2 | Tumbuhnya IKM start-up berbasis Teknologi | IKM (Kumulatif) | 432.560.000 | 449.630.000 | 488.400.000 | 537.240.000 | 590.964.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 3 tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif | | | | | | | | |
| 1 | Efektifitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPIPI | Persen | 0 | 129.720.000 | 344.808.000 | 379.288.000 | 417.216.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 4 Meningkatkan Kemampuan Industri Berinovasi dan Jasa dalam Riset | | | | | | | | |
| 1 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam perdagangan barang dan jasa di BPIPI | Persen | 0 | 147.446.000 | 209.585.000 | 230.843.000 | 263.597.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 5 Meningkatkan Kemampuan Pelaku Industri Persepatuan | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi | IKM (Kumulatif) | 89.210.000 | 277.634.000 | 32.500.000 | 35.750.000 | 39.325.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| 2 | IKM Persepatuan yang melakukan kemitraan | IKM (Kumulatif) | 0 | 0 | 135.120.000 | 148.632.000 | 163.495.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 6 Pendampingan dan Pengembangan Produk | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Produk yang dimanfaatkan oleh IKM | Produk (Kumulatif) | 370.665.000 | 225.780.000 | 1.163.911.000 | 1.280.302.000 | 1.408.332.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain |
| SK 7 Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Ibtarab, Lembaga Pendidikan, Asosiasi Industri, Asosiasi | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Kerjasama Teknis yang baru maupun yang tindak lanjut | KS | 57.710.000 | 685.545.000 | 657.782.000 | 723.560.000 | 795.616.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 8 Terwujudnya ASN profesional & Berkepribadian | | | | | | | | |
| 1 | Rate - rata indeks profesionalitas ASN BPIPI | Indeks | 0 | 3.927.798.000 | 164.850.000 | 181.335.000 | 199.468.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 9 Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Ind. 4.0 BPIPI | Indeks | 0 | 0 | 278.500.000 | 306.350.000 | 356.985.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 10 Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan Hrm. | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Penyerapan Anggaran | Persen | 238.000.000 | 691.180.000 | 1.042.563.000 | 1.146.819.000 | 1.261.500.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| 2 | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) BPIPI | Indeks | 10.813.055.000 | 601.727.000 | 25.578.269.000 | 37.236.117.000 | 7.959.729.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |
| SK 11 Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan | | | | | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP BPIPI | Nilai | 4.374.460.000 | 1.775.060.000 | 26.500.000 | 29.150.000 | 32.065.000 | Sub-Fungsi Eklat, Sub-Fungsi Desain, Sub-Fungsi Tata Usaha |

Rencana Strategis 2020–2024

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

Lampiran 3 Matrik Keterkaitan Berdasarkan RO

| Struktur Data | Kode | Nomenklatur | Unit Terkait | Satuan | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|--------------|--|------------------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | | Target | Anggaran (dlm ribu) | Target | Anggaran (dlm ribu) | Target | Anggaran (dlm ribu) | Target | Anggaran (dlm ribu) | Target | Anggaran (dlm ribu) |
| Tujuan | TJ | Meningkatnya Peran IKM Alas Kaki dalam Ekosistem Industri pada Perekonomian Nasional | | | | | | | | | | | | |
| | TJ1.1 | Pertumbuhan Industri Alas Kaki dan Industri Kulit | Semua Sub Fungsi | Persen | -8,6 | 20.910.057 | 7,6 | 11.788.112 | 7,8 | 32.810.889 | 7,9 | 45.191.973 | 8 | 16.711.165 |
| Sasaran Kegiatan | SK.1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Alas Kaki | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.1.1 | Meningkatnya kontribusi nilai produksi IKM yang dibina BPIPI | Semua Sub Fungsi | Persen | 0,7 | 10.988.260 | 2 | 735.419 | 3 | 1.439.580 | 4 | 1.583.538 | 5 | 1.741.891 |
| | SK.1.2 | Meningkatnya kontribusi nilai penjualan IKM yang dibina BPIPI | Semua Sub Fungsi | Persen | 0,7 | 284.600 | 3 | 1.110.092 | 4 | 208.526 | 5 | 229.378 | 6 | 252.315 |
| | SK.1.3 | Proporsi Nilai tambah IKM Alas Kaki terhadap IKM Nasional | Semua Sub Fungsi | Persen | 0 | - | 0 | - | 2 | 450.858 | 3 | 495.943 | 4 | 545.537 |
| | SK.1.4 | IKM alas kaki yang mendapatkan ijin usaha | Semua Sub Fungsi | IKM (kumulatif) | 30 | 654.530 | 65 | 664.146 | 105 | 446.961 | 150 | 491.657 | 200 | 540.822 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI.029 | Fasilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK.2 | Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 | | | | 11.927.390 | | 2.509.657 | | 2.545.925 | | 2.800.516 | | 3.080.565 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.2.1 | Nilai Indi IKM yang dibina BPIPI | Semua Sub Fungsi | Point | 1 | 31.000 | 1,2 | 364.420 | 1,22 | 142.156 | 1,24 | 156.371 | 1,26 | 172.008 |
| | SK.2.2 | Tumbuhnya IKM start up berbasis Teknologi | Semua Sub Fungsi | IKM (Kumulatif) | 3 | 374.850 | 7 | 449.630 | 12 | 488.400 | 18 | 537.240 | 25 | 590.964 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI.029 | Fasilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK.3 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIPI | | | | 405.850 | | 814.050 | | 630.556 | | 693.611 | | 762.972 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.3.1 | Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif | Semua Sub Fungsi | Persen | 0 | - | 71 | 129.720 | 73 | 344.808 | 75 | 379.288 | 77 | 417.216 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI.029 | Fasilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK.4 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIPI | | | | | | 129.720 | | 344.808 | | 379.288 | | 417.216 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.4.1 | Meningkatnya Kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri | Semua Sub Fungsi | Persen | 0 | - | 51 | 147.446 | 52 | 209.585 | 53 | 230.543 | 54 | 253.597 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI.029 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPIPI | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK.5 | Fasilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.5.1 | Meningkatkan Kemampuan Pelaku Industri Persepatuan | Semua Sub Fungsi | IKM (Kumulatif) | 500 | 102.620 | 1050 | 227.634 | 1070 | 32.500 | 1100 | 35.750 | 1140 | 39.325 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI.029 | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.5.2 | IKM Persepatuan yang melakukan kemitraan | Semua Sub Fungsi | IKM (Kumulatif) | 0 | - | 0 | - | 5 | 135.120 | 12 | 148.632 | 21 | 163.495 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI.029 | IKM Persepatuan yang melakukan kemitraan | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | SK.5 | Fasilitasi dan Pembinaan Industri | | | | 102.620 | | 227.634 | | 167.620 | | 184.382 | | 202.820 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.5.1 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIPI | | | | | | | | | | | | |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| Struktur Data | Kode | Nomenklatur | Unit Terkait | Satuan | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|--------------|--|--|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | | Target | Anggaran (djm ribu) | Target | Anggaran (djm ribu) | Target | Anggaran (djm ribu) | Target | Anggaran (djm ribu) | Target | Anggaran (djm ribu) |
| Sasaran Kegiatan | SK.6 | Pendampingan dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.6.1 | Pengembangan Produk yang dibuktikan oleh KM | Sub Fungsi Output Sub-Fungsi (Rata-rata) | Produk (Kumulatif) | 7 | 312.955 | 15 | 225.780 | 24 | 1.163.911 | 34 | 1.280.302 | 45 | 1.408.332 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI. | Facilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| | 029 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIP | | | | 312.955 | | 225.780 | | 1.163.911 | | 1.280.302 | | 1.408.332 |
| Sasaran Kegiatan | SK.7 | Monoguinia kerjasama dengan Lembaga yang Lembaga Pendidikan, asosiasi industri, Asosiasi Profesi dan lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.7.1 | Jumlah Kejasama Teknis yang baru maupun yang telah ada | Semua Sub Fungsi | Keja Sama | 10 | 405.275 | 11 | 685.545 | 12 | 657.782 | 13 | 723.560 | 14 | 795.916 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI. | Facilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| | 029 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIP | | | | 405.275 | | 685.545 | | 657.782 | | 723.560 | | 795.916 |
| Sasaran Kegiatan | SK.8 | Terwujudnya ASN profesional & Berkepercayaan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.8.1 | Rata-rata indeks profesionalitas ASN BPIPI | Semua Sub Fungsi | Indeks | 0 | - | 50 | 3.927.798 | 51 | 164.850 | 52 | 181.335 | 53 | 199.648 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI. | Facilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| | 029 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIP | | | | - | | 3.927.798 | | 164.850 | | 181.335 | | 199.648 |
| Sasaran Kegiatan | SK.9 | Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.9.1 | Nilai Indeksi 4.0 BPIPI | Semua Sub Fungsi | Indeks | 0 | - | 0 | - | 1,7 | 278.500 | 1,9 | 306.350 | 2,1 | 336.985 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI. | Facilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| | 029 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIP | | | | - | | - | | 278.500 | | 306.350 | | 336.985 |
| Sasaran Kegiatan | SK.10 | Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan Prima | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.10.1 | Tingkat Penyerapan Anggaran | Semua Sub Fungsi | Persen | 95 | 481.500 | 95,5 | 693.695 | 95,9 | 1.042.563 | 96,1 | 1.146.819 | 96,5 | 1.261.500 |
| | SK.10.2 | Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat BPIPI | Semua Sub Fungsi | Indeks | 3,55 | 6.862.396 | 3,6 | 601.727 | 4 | 25.578.285 | 3,7 | 37.236.117 | 3,75 | 7.959.729 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI. | Facilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| | 029 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIP | | | | 3.393.896 | | 1.295.422 | | 1.407.963 | | 1.548.758 | | 1.703.633 |
| | 6071.RBL.001 | Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | | | | | | | | 19.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | 6040.EBA.994 | Layanan Dukungan Manajemen Layanan Perkantoran | | | | 3.950.000 | | | | 6.212.889 | | 6.834.178 | | 7.517.596 |
| Sasaran Kegiatan | SK.11 | Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | SK.11.1 | Nilai SAKIP BPIPI | Semua Sub Fungsi | Nilai | 77 | 412.071 | 78 | 1.775.060 | 79 | 26.500 | 80 | 29.150 | 81 | 32.065 |
| Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen | 6071.QDI. | Facilitasi dan Pembinaan Industri | | | | | | | | | | | | |
| | 029 | Pengembangan IKM Persepatuan Melalui BPIP | | | | 412.071 | | 1.775.060 | | 26.500 | | 29.150 | | 32.065 |

KERANGKA PENDANAAN SEBELUM REFOCUSING TAHUN 2022

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | PAGU |
|-----------------|---|----------------------|
| EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 7.598.000.000 |
| 6071 | Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka | 7.598.000.000 |
| 6071.QDI | Fasilitasi Dan Pembinaan Industri | 7.598.000.000 |
| 029 | Pengembangan Ikm Persepatuan Melalui Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (bpipi) | 7.598.000.000 |
| 051 | Pengembangan Kemiteraan Dan Penguatan Industri 4.0 | 398.235.000 |
| A | Temu Pelanggan Bpipi | 250.610.000 |
| B | Pemberdayaan Ikm Alas Kaki Melalui Penerapan Making Indonesia 4.0 | 53.025.000 |
| C | Pengembangan Indonesia Footwear Networking (ifn) | 94.600.000 |
| 052 | Pengembangan Produk, Kreatifitas Dan Ekosistem Industri | 1.208.214.000 |
| A | Kompetisi Desain, Fotografi Dan Videografi Alas Kaki Tingkat Nasional (ifcc 2022) | 587.579.000 |
| B | Pengembangan Desain Dan Prototype Alas Kaki | 195.490.000 |
| C | Pendampingan Mutu Dan Penerapan Teknologi Ikm | 109.380.000 |
| D | Dukungan Dalam Kegiatan Bangsa Buatan Indonesia - Lagafest 2022 | 170.625.000 |
| E | Dukungan Dalam Kegiatan Mandalikia | 145.140.000 |
| 053 | Penyediaan Informasi Pasar, Promosi, Dan Pemasaran | 601.851.000 |
| A | Manajemen Media Sosial Bpipi | 161.141.000 |
| B | Pengembangan Media Promosi | 145.865.000 |
| C | Uji Coba Pasar | 294.845.000 |
| 054 | Pendampingan Ikm | 3.216.863.000 |
| A | Pendampingan Ikm - Desain Alas Kaki (inwall) | 150.274.000 |
| B | Pendampingan Ikm - Mekanik Mesin Jahit (inwall) | 129.660.000 |
| C | Pendampingan Ikm - Operator Jahit Upper Alas Kaki (inwall) | 148.260.000 |
| D | Pendampingan Ikm - Assembling Alas Kaki (inwall) | 141.277.000 |
| E | Pendampingan Ikm - Pembuatan Produk Kulit (inwall) | 159.080.000 |
| F | Pendampingan Ikm - Desain Dan Pola Alas Kaki (outwall) | 201.953.000 |
| G | Pendampingan Ikm - Assembling Alas Kaki (outwall) | 135.740.000 |
| H | Pendampingan Ikm - Manajemen Alas Kaki (daring) | 48.325.000 |
| I | Pendampingan Ikm - Desain Dan Pola (daring) | 79.445.000 |
| J | Pendampingan Ikm - Pembuatan Produk Kulit (daring) | 65.107.000 |
| K | Pendampingan Ikm Sentra Melalui Sikomokolab | 175.660.000 |

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | PAGU |
|-----------------|--|----------------------|
| L | Workshop Teknologi Produksi Alas Kaki Dan Produk Kulit (untuk Sekolah Dan Universitas) | 210.425.000 |
| M | Rekrutmen Peserta Pendampingan Ikm Alas Kaki | 142.235.000 |
| N | Pendampingan Ikm Alas Kaki Melalui Inkubator Bisnis Teknologi | 575.970.000 |
| O | Koordinasi Pengembangan Ikm Persepatuan | 808.922.000 |
| P | Pengembangan Kurikulum Dan Modul Pendampingan | 19.430.000 |
| Q | Pengembangan, Reviu, Dan Evaluasi Skkni Alas Kaki | 25.100.000 |
| 055 | Peningkatan Kemampuan Dan Kapasitas Kelembagaan | 2.172.837.000 |
| A | Penyusunan, Monitoring, Dan Evaluasi Program Kerja Bpipi | 30.720.000 |
| B | Pengembangan Ikm Alas Kaki Melalui Kerjasama Teknis | 24.950.000 |
| C | Pengendalian Pengelolaan Kegiatan Dipa Tahun Anggaran 2022 | 22.830.000 |
| D | Pengendalian Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip) | 18.430.000 |
| E | Pemeliharaan Sertifikasi Kelembagaan | 108.285.000 |
| F | Penerapan Zona Integritas | 21.705.000 |
| G | Pengembangan Dan Inovasi Layanan Publik Melalui Sistem Informasi Terintegrasi | 189.700.000 |
| H | Manajemen Kinerja Pengembangan Industri Persepatuan | 360.624.000 |
| I | Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (pnbp) | 136.452.000 |
| J | Pengembangan Peta Potensi Alas Kaki | 122.370.000 |
| K | Manajemen Layanan Jasa Teknis Dan Pengembangan Produk | 145.685.000 |
| L | Manajemen Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai | 381.975.000 |
| M | Pengadaan Peralatan Sarana Pengembangan Produk | 85.960.000 |
| N | Pengadaan Peralatan Komputer dan Perlengkapannya | 355.997.000 |
| P | Persiapan/perencanaan Pembebasan Tanah | 5.600.000 |
| R | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | 161.554.000 |
| WA | Program Dukungan Manajemen | 6.212.889.000 |
| 6040 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah Dan Aneka | 6.212.889.000 |
| 6040.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 6.212.889.000 |
| 994 | Layanan Perkantoran | 6.212.889.000 |
| 001 | Gaji Dan Tunjangan | 3.700.000.000 |
| A | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan | 3.700.000.000 |
| 002 | Operasional Dan Pemeliharaan Kantor | 2.512.889.000 |
| A | Administrasi Kegiatan | 249.600.000 |
| B | Operasional Perkantoran | 1.818.089.000 |
| C | Pembayaran Honorarium Kegiatan Bpipi (tenaga Bidang Dan Operator) | 445.200.000 |

**PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BPIPI
 BALAI PEMBERDAYAAN INDSUTRI PERSEPATUAN INDONESIA**

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|--|---------------|----------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TJ | Meningkatnya Peran IKM Alas Kaki dalam ekosistem industri pada Perekonomian Nasional | | | | | | |
| TJ.1 | Pertumbuhan Industri Alas Kaki dan industri kulit | -0,99 | -8,6 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Pertumbuhan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki terhadap di dasarkan pada pengelompokan KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia). Pengukuran dihitung dari pertumbuhan industri alas kaki, industri kulit dan barang jadi kulit per tahun dalam persen year on year. | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Sumber data di ambil dan di olah dari BPS (Badan Pusat Statistik), BI (Bank Indonesia), Indoanalis Research, BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal), Ditjen IKMA – Kementerian Perindustrian dan Diten Bea Cukai – Kementerian Keuangan. | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Pertumbuhan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (y on Y) | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | Panggung jawab data | | | | |
| Persen | | Maksimasi | Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|--|---------------|----------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri alas kaki | | | | | | |
| SK.1.1 | Meningkatnya nilai produksi IKM yang dibina BPIPI | - | 0,7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Nilai produksi adalah jumlah produk alas kaki, barang jadi kulit, sandal dan aksesoris lainnya yang diproduksi oleh IKM alumni BPIPI yang mengikuti program BPIPI pada tahun anggaran berjalan | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Data di ambil dari nilai total produksi pada tahun IKM yang mengikuti program BPIPI pada tahun berjalan | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Data di ambil dari nilai total produksi pada awal tahun dibandingkan dengan akhir tahun kemudian di prosentasikan kenaikannya | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | Panggung jawab data | | | | |
| Persen | | Maksimasi | Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | | |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|----------------------------|---|---|---|
| SK 1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri alas kaki, dan produk kulit | | | | | | |
| SS.1.2 | Meningkatnya nilai penjualan yang dibina oleh BPIPI | - | 0,7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Nilai penjualan adalah jumlah produk alas kaki, barang jadi kulit, sandal dan aksesoris lainnya yang berhasil dijual oleh IKM alumni BPIPI yang mengikuti program BPIPI pada tahun anggaran berjalan. | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Data di ambil dari nilai total penjualan/omset pada tahun IKM yang mengikuti program BPIPI pada tahun berjalan | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Data di ambil dari nilai total penjualan pada awal tahun berjalan dibandingkan dengan akhir tahun kemudian di prosentasikan kenaikannya | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Penganggung jawab data | | | |
| Persen | | Maksimasi | | Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2021 | Target | | | | |
|---|--|---------------|--------|----------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri alas kaki | | | | | | |
| SK.1.3 | Proporsi nilai tambah IKM terhadap IKM Nasional | 2,1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Nilai tambah IKM alas kaki terhadap IKM Nasional. Nilai tambah adalah jumlah nilai barang yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Sumber data di ambil dan di olah dari BPS (Badan Pusat Statistik), BI (Bank Indonesia), Indoanalysis Research, BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal), Ditjen IKMA – Kementerian Perindustrian dan Diten Bea Cukai – Kementerian Keuangan | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Data nilai tambah IKM alas kaki di bandingkan dengan nilai tambah IKM nasional kemudian di persentase. | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Penganggung jawab data | | | |
| Persen | | Maksimasi | | Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|------|--|---------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 1 | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri alas kaki, dan produk kulit | | | | | | |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|----------------------------|----|----|----|
| SK 1.4 | IKM Kulit, barang jadi kulit dan alas kaki yang mendapatkan ijin usaha | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| IKM yang mendapatkan ijin usaha adalah IKM yang telah mendapatkan pengakuan resmi berupa ijin usaha. Ijin usaha minimal yang bisa dilampirkan sebagai bukti surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa setempat | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| IKM yang didamping atau dibina atau mendapatkan layanan BPIPI pada tahun berjalan | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Data ijin/ surat keterangan dilampirkan berupa salinan dokumen/ soft copy | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Pengganggung jawab data | | | |
| Persen | | Maksimasi | | Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|--|---------------|--------|-------------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 2 | Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri alas kaki | | | | | | |
| SK 2.1 | Nilai Indi IKM alas kaki/produk kulit | 0,98 | 1 | 1,2 | 1,22 | 1,24 | 1,26 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| INDI 4.0 Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) adalah tentang standard pengukuran tingkat kesiapan industry dalam bertransformasi menuju industry 4.0 sebagaimana yang di atur dalam Permenperin No.21 Tahun 2020. INDI 4.0. INDI 4.0 memiliki outpur 1 index, 5 pilar dan 17 sub pilar penilaian | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| INDI 4.0 memiliki outpur 1 index, 5 pilar dan 17 sub pilar penilaian yang diformulasikan dalam bentuk kuisisioner yang di isi oleh masing peserta IKM yang melakukan self assessment. | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| INDI 4.0 memiliki outpur 1 index, 5 pilar dan 17 sub pilar penilaian dengan scoring level 0 – 4. Dimana 5 pilar INDI 4.0 masing memiliki nilai/ bobot sebagai berikut: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen dan organisasi : 17,5% • Orang dan Budaya :30 % • Produk dan layanan : 17,5% • Teknologi : 17,5% • Operasi pabrik : 17,5% | | | | | | | |
| Terdapat 33 pertanyaan dengan 3 pengelompokan | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 7 pertanyaan untuk informasi umum perusahaan/ikm • 23 pertanyaan untuk 5 pilar INDI • 3 pertanyaan untuk tantangan dan transformasi | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Pengganggung jawab data | | | |
| Point | | Maksimasi | | Bidang P3KI | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---------|---|---------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 3 | Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif | | | | | | |
| SK. 3.1 | Efektifitas regulasi yang ditetapkan dilingkungan BPIPI | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| Definisi/Deskripsi | | |
|--|-------------|------------------------|
| Jumlah kebijakan yang ditetapkan di BPIPI. Penyusunan regulasi BPIPI diharapkan dapat untuk meningkatkan kinerja BPIPI dan efektif sehingga tujuan organisasi tercapai. | | |
| Sumber data | | |
| SOP yang diterbitkan BPIPI, serta hasil monitoring dan evaluasi ditjen IKMA | | |
| Cara menghitung (formula) | | |
| Efektifitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPIPI didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh BPIPI dengan melihat regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut masih sesuai dan dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut disusun. Dengan rumus : (Jumlah regulasi yang masih sesuai/jumlah total regulasi)*100 | | |
| Satuan | Klasifikasi | Penganggung jawab data |
| Persen | Maksimasi | Sub bag Tata Usaha |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2021 | Target | | | | |
|--|--|------------------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 4 | Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri | | | | | | |
| SK 4.1 | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPIPI | 50 | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat dari website (http://tkdn.kemenperin.go.id) | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Jumlah total kegiatan pengadaan bpi yang memenuhi TKDN dibagi dengan jumlah total kegiatan pengadaan, kemudian dipersentase. | | | | | | | |
| Satuan | Klasifikasi | Penganggung jawab data | | | | | |
| Persen | Maksimasi | Sub bag Tata Usaha | | | | | |
| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 5 | Meningkatnya kemampuan pelaku industri persepatuan | | | | | | |
| SS.5.1 | Tenaga Kerja yang memperoleh sertifikat Kompetensi | 450 | 500 | 1050 | 1070 | 1100 | 1140 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Sertifikasi kompetensi merupakan indikator bahwa SDM yang dihasilkan dari proses pelatihan memiliki kemampuan yang memadai dan konsisten pada bidang yang telah diikuti. Hal tersebut ditunjukkan melalui kegiatan asesemen yang dilakukan dengan bukti capaian berupa sertifikat kompetensi untuk SDM yang dinyatakan kompeten. | | | | | | | |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| | | |
|---|-------------|--|
| Sumber data | | |
| Data diambil dari hasil asesmen yang dilakukan kepada peserta pelatihan melalui LSP yang dimiliki oleh BPIPI dan dikumulatifkan setiap tahunnya | | |
| Cara menghitung (formula) | | |
| Dihitung dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP melalui LSP BPIPI | | |
| Satuan | Klasifikasi | Pengganggung jawab data |
| Orang | Maksimasi | Sub Bag Tata Usaha, Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|--|---------------|--------|--|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 5 | Meningkatnya kemampuan pelaku industri persepatuan | | | | | | |
| SK.5.2 | IKM Persepatuan yang melakukan Kemitraan | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Penguatan industri alas kaki dapat didukung dengan banyaknya industri yang melakukan kemitraan antara industri kecil, sedang dan besar serta sector ekonomi lainnya. Kriteria industri yang melakukan kemitraan dengan industri lainya/sector lainya adalah jumlah industri yang melakukan link and match/temu bisnis/ penajakan kerjasama/perjanjian/kontak | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Data industri yang melakukan kemitraan antara industri kecil, sedang dan besar serta dengan sector lainnya | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Jumlah industri yang melakukan link and match/temu bisnis atau penajakan kerjasama atau perjanjian/kontrak antara industri kecil, sedang dan besar serta dengan sector lainnya | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Pengganggung jawab data | | | |
| IKM | | Maksimasi | | Sub Bag Tata Usaha, Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--------------------|---|---------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 6 | Pendampingan dan Pengembangan Produk | | | | | | |
| SK 6.1 | Hasil Pengembangan produk yang digunakan oleh IKM | 7 | 7 | 15 | 24 | 34 | 45 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| | | |
|--|-------------|----------------------------|
| Pemberdayaan produk yang dimaksud yaitu hasil desain BPIPI. Tujuannya adalah bagaimana hasil Pemberdayaan produk dimanfaatkan oleh IKM/industri. | | |
| Sumber data | | |
| Data kumulatif di ambil dari hasil Pemberdayaan produk BPIPI baik yang berhasil di produksi dan dijual oleh industri pengguna/ IKM | | |
| Cara menghitung (formula) | | |
| Setiap hasil Pemberdayaan produk yang berhasil di produksi dan di julan oleh industri/ IKM pengguna layanan BPIPI | | |
| Satuan | Klasifikasi | Pengganggung jawab data |
| IKM | Maksimasi | Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|---|---------------|--------|--|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 7 | Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Asosiasi Profesi dan lainnya | | | | | | |
| SK 7.1 | Kerjasama Teknis BPIPI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Kerjasama teknis adalah program bersama yang dilakukan oleh BPIPI dengan para pihak yang mempunyai kepentingan sama dalam hal Pemberdayaan industri alas kaki di Indonesia. Kerjasama ini fokus pada pelaksanaan kegiatan bersama yang saling memberikan kontribusi berdasarkan kompetensi masing-masing pihak. | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Data secara kumulatif di ambil dari jumlah unit kerjasama BPIPI dengan pihak luar yang baru maupun yang ditindaklanjuti | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Dihitung berdasarkan jumlah dokumen kerjasama | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Pengganggung jawab data | | | |
| Kerjasama | | Maksimasi | | Sub Bag Tata Usaha, Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 8 | Terwujudnya ASN Profesional dan Berkepribadian | | | | | | |
| SK 8.1 | Rata – rata indeks profesionalitas ASN BPIPI | 0 | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| | | |
|---|--------------------|--|
| Indeks profesionalitas ASN Ditjen IKMA adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya Pemberdayaan profesionalisme ASN | | |
| Sumber data | | |
| Laporan Indeks Profesionalitas ASN di BPIPI | | |
| Cara menghitung (formula) | | |
| Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang sebagai berikut : a. 91 – 100 (sangat tinggi), b. 81 – 90 (tinggi); c. 71 – 80 (sedang); d. 61 – 70 (Rendah); e. 60 kebawah (sangat rendah) | | |
| Satuan | Klasifikasi | Penganggung jawab data |
| indeks | Maksimasi | Sub Bag Tata Usaha, Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|---|---|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 9 | Terwujudnya sistem informasi yang berkualitas | | | | | | |
| SK 9.1 | Nilai Indi 4.0 BPIPI | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 1,9 | 2,1 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| INDI 4.0 Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) adalah tentang standard pengukuran tingkat kesiapan industry dalam bertransformasi menuju industry 4.0 sebagaimana yang di atur dalam Permenperin No.21 Tahun 2020. INDI 4.0. INDI 4.0 memiliki outpur 1 index, 5 pilar dan 17 sub pilar penilaian. Penilaian indi 4.0 untuk mengukur kesiapan BPIPI menghadapi era 4.0 | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| INDI 4.0 memiliki outpur 1 index, 5 pilar dan 17 sub pilar penilaian yang diformulasikan dalam bentuk kuisisioner yang di isi oleh BPIPI | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| INDI 4.0 memiliki outpur 1 index, 5 pilar dan 17 sub pilar penilaian dengan scoring level 0 – 4. Dimana 5 pilar INDI 4.0 masing memiliki nilai/ bobot sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen dan organisasi : 17,5% • Orang dan Budaya :30 % • Produk dan layanan : 17,5% • Teknologi : 17,5% • Operasi pabrik : 17,5% Terdapat 33 pertanyaan dengan 3 pengelompokan <ul style="list-style-type: none"> • 7 pertanyaan untuk informasi umum perusahaan/ikm • 23 pertanyaan untuk 5 pilar INDI • 3 pertanyaan untuk tantangan dan transformasi | | | | | | | |
| Satuan | Klasifikasi | Penganggung jawab data | | | | | |
| Point | Maksimasi | Sub Bag Tata Usaha , Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | | | |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|--|--|---------------|--------|---|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| S.10 | Terwujudnya birokrasi BPIPI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | | | | | | |
| SS.10.1 | Tingkat Penyerapan Anggaran | 95 | 95 | 95,5 | 95,9 | 96,1 | 96,5 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pengeluaran keuangan yang digunakan oleh BPIPI dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja. | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Di ambil dari pengeluaran kegiatan yang telah dipertanggungjawabkan kemudian di rekonsiliasikan dengan bendahara keuangan | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Akumulasi jumlah pengeluaran anggaran yang telah di verifikasi | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Penganggung jawab data | | | |
| Persen | | Maksimalisasi | | Sub Bag Tata Usaha, Bidang P2W dan P3KI | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|---|--|---------------|--------|--|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 10 | Terwujudnya birokrasi BPIPI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | | | | | | |
| SS.10.1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPIPI | 3,50 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat atau pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh layanan BPIPI dengan membandingkan dengan harapan dan kebutuhan. | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Di ambil dari kuisioner yang disebar ke masyarakat pengguna layanan | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Hasil pengukuran skala 1 - 4 dihitung setiap pengguna dan dirata-rata seluruh pengguna | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Penganggung jawab data | | | |
| Indeks | | Maksimalisasi | | Sub Bag Tata Usaha, Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | |

| Kode | Indikator Kinerja | Baseline 2019 | Target | | | | |
|------|-------------------|---------------|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|----|---|----|----|----|
| SK 11 | Tersusnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel | | | | | | |
| SS.11.1 | Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Definisi/Deskripsi | | | | | | | |
| SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. | | | | | | | |
| Sumber data | | | | | | | |
| Di ambil dari dokumen renstra, dokumen perjanjian kinerja, rencana kinerja, laporan akuntabilitas, laporan triwulan dan semua aspek penilaian yang ada di KKE SAKIP | | | | | | | |
| Cara menghitung (formula) | | | | | | | |
| Penilaian di ambil dari nilai aspek yang ada di KKE dan diverifikasi oleh APIP | | | | | | | |
| Satuan | | Klasifikasi | | Penganggung jawab data | | | |
| Nilai | | Maksimasi | | Sub Bag Tata Usaha Tim Kerja P3 dan Tim P2IKM | | | |

Rencana Strategis 2020–2024
Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

Lampiran 5. Rencana Aksi Renstra

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Target Antara (Columm) | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
| | | | | Taruket Antara | Kegiatan | Taruket Antara | Kegiatan | Taruket Antara | Kegiatan | Taruket Antara | Kegiatan | Taruket Antara | Kegiatan |
| 1 | Meningkatnya Daya saing dan kemandirian industri alas kaki, dan produk kulit | Meningkatnya nilai produksi IKM yang dibina (BPI) | 2,00% | 20% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM | 40% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM | 60% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM | 80% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM | 100% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM |
| | | | 3,00% | 20% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM | 40% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM | 60% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM | 80% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM | 100% | - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengambilan data nilai produksi yang dibina IKM - Pendampingan IKM - Pengukuran nilai produksi setelah pemberian bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi IKM |
| | | | 35 | 20% | - Rekrutmen peserta Bimtek - Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bimtek untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru - Pendampingan pencapaian jin usaha | 40% | - Rekrutmen peserta Bimtek - Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bimtek untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru - Pendampingan pencapaian jin usaha | 60% | - Rekrutmen peserta Bimtek - Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bimtek untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru - Pendampingan pencapaian jin usaha | 80% | - Rekrutmen peserta Bimtek - Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bimtek untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru - Pendampingan pencapaian jin usaha | 100% | - Rekrutmen peserta Bimtek - Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bimtek untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru - Pendampingan pencapaian jin usaha |
| 2 | Rencana Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri alas kaki dan produk kulit | Nilai IKM alas kaki/produk kulit | 12 | 20% | - Mengidentifikasi industri alas kaki yang sudah siap menuju industri - Melakukan asesmen inid awal - Mengevaluasi hasil asesmen - Memberikan rekomendasi peningkatan industri menuju 4.0 - Melakukan pendampingan kebutuhan industri menuju 4.0 - Melakukan asesmen akhir | 40% | - Mengidentifikasi industri alas kaki yang sudah siap menuju industri - Melakukan asesmen inid awal - Mengevaluasi hasil asesmen - Memberikan rekomendasi peningkatan industri menuju 4.0 - Melakukan pendampingan kebutuhan industri menuju 4.0 - Melakukan asesmen akhir | 60% | - Mengidentifikasi industri alas kaki yang sudah siap menuju industri - Melakukan asesmen inid awal - Mengevaluasi hasil asesmen - Memberikan rekomendasi peningkatan industri menuju 4.0 - Melakukan pendampingan kebutuhan industri menuju 4.0 - Melakukan asesmen akhir | 80% | - Mengidentifikasi industri alas kaki yang sudah siap menuju industri - Melakukan asesmen inid awal - Mengevaluasi hasil asesmen - Memberikan rekomendasi peningkatan industri menuju 4.0 - Melakukan pendampingan kebutuhan industri menuju 4.0 - Melakukan asesmen akhir | 100% | - Mengidentifikasi industri alas kaki yang sudah siap menuju industri - Melakukan asesmen inid awal - Mengevaluasi hasil asesmen - Memberikan rekomendasi peningkatan industri menuju 4.0 - Melakukan pendampingan kebutuhan industri menuju 4.0 - Melakukan asesmen akhir |
| | | | Tumbuhnya IKM start up berbasis teknologi | 4 | 20% | - Sosialisasi IKM start up - Pendaftaran peserta - Seleksi administratif - Seleksi wawancara - Pengumuman - Pendampingan IKM start up - Evaluasi IBT - Pembuatan Laporan | 50% | - Sosialisasi IKM start up - Pendaftaran peserta - Seleksi administratif - Seleksi wawancara - Pengumuman - Pendampingan IKM start up - Evaluasi IBT - Pembuatan Laporan | 75% | - Sosialisasi IKM start up - Pendaftaran peserta - Seleksi administratif - Seleksi wawancara - Pengumuman - Pendampingan IKM start up - Evaluasi IBT - Pembuatan Laporan | 100% | - Sosialisasi IKM start up - Pendaftaran peserta - Seleksi administratif - Seleksi wawancara - Pengumuman - Pendampingan IKM start up - Evaluasi IBT - Pembuatan Laporan | 100% |
| 3 | Tersedianya regulasi pembanguan industri yang efektif | Efektifitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPI | 71% | 20% | - Pelaksanaan evaluasi efektifitas regulasi | 40% | - Pelaksanaan evaluasi efektifitas regulasi | 60% | - Pelaksanaan evaluasi efektifitas regulasi | 80% | - Pelaksanaan evaluasi efektifitas regulasi | 100% | - Pelaksanaan evaluasi efektifitas regulasi |
| | | | | | | | | | | | | | |

Rencana Strategis 2020–2024

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Target Antara (tahunan) | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
| | | | | Target Antara | Kegiatan | Target Antara | Kegiatan | Target Antara | Kegiatan | Target Antara | Kegiatan | Target Antara | Kegiatan |
| 4 | Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri | Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPIPI | 50% | - | - | 0% | - | 60% | - | 80% | - | 100% | - |
| 5 | Meningkatnya Kemampuan Pelaku Industri Persepatuan | Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sertifikat Kompetensi | min 550 | 20% | - - Simbiosis Teknis - Proses assesmen kompetensi - Penilaian Tim Teknis - Rapat Pleno | 40% | - - Simbiosis Teknis - Proses assesmen kompetensi - Penilaian Tim Teknis - Rapat Pleno | 60% | - - Simbiosis Teknis - Proses assesmen kompetensi - Penilaian Tim Teknis - Rapat Pleno | 80% | - - Simbiosis Teknis - Proses assesmen kompetensi - Penilaian Tim Teknis - Rapat Pleno | 100% | - - Simbiosis Teknis - Proses assesmen kompetensi - Penilaian Tim Teknis - Rapat Pleno |
| 6 | Pendampingan dan Pengembangan Produk | Hasil Pengembangan yang digunakan oleh IKM | 8 | 20% | - pembuatan Prototype - Menawarkan kepada IKM yang tertarik untuk mass production | 40% | - pembuatan Prototype - Menawarkan kepada IKM yang tertarik untuk mass production | 60% | - pembuatan Prototype - Menawarkan kepada IKM yang tertarik untuk mass production | 80% | - pembuatan Prototype - Menawarkan kepada IKM yang tertarik untuk mass production | 100% | - pembuatan Prototype - Menawarkan kepada IKM yang tertarik untuk mass production |
| 7 | Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi dan lainnya | Jumlah kerjasama teknis BPIPI | 11 | 20% | - Identifikasi potensi kerjasama - Membuka kolaborasi dengan stakeholder | 40% | - Identifikasi potensi kerjasama - Membuka kolaborasi dengan stakeholder | 60% | - Identifikasi potensi kerjasama - Membuka kolaborasi dengan stakeholder | 80% | - Identifikasi potensi kerjasama - Membuka kolaborasi dengan stakeholder | 100% | - Identifikasi potensi kerjasama - Membuka kolaborasi dengan stakeholder |
| 8 | Terwujudnya ASN profesional & Berkepribadian | Rata-rata indeks profesionalitas ASN BPIPI | 71% | 0% | - | 0% | - | 60% | - | 80% | - | 100% | - |
| 9 | Terwujudnya birokrasi BPIPI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | Tingkat Penyerapan Anggaran | 95,5 | 20% | - Evaluasi kegiatan BPIPI - Penyerapan anggaran | 40% | - Evaluasi kegiatan BPIPI - Penyerapan anggaran | 60% | - Evaluasi kegiatan BPIPI - Penyerapan anggaran | 80% | - Evaluasi kegiatan BPIPI - Penyerapan anggaran | 100% | - Evaluasi kegiatan BPIPI - Penyerapan anggaran |
| | | Nilai IKM BPIPI | 3,6 | 20% | - Penyebaran kuisener layanan BPIPI - Rekapitulasi penilaian - evaluasi hasil | 40% | - Penyebaran kuisener layanan BPIPI - Rekapitulasi penilaian - evaluasi hasil | 60% | - Penyebaran kuisener layanan BPIPI - Rekapitulasi penilaian - evaluasi hasil | 80% | - Penyebaran kuisener layanan BPIPI - Rekapitulasi penilaian - evaluasi hasil | 100% | - Penyebaran kuisener layanan BPIPI - Rekapitulasi penilaian - evaluasi hasil |
| | | Nilai Maturitas SPIP | 3,65 | 20% | - Mengisi kuisener LKE - Penetapan identifikasi resiko - evaluasi SPIP - | 40% | - Mengisi kuisener LKE - Penetapan identifikasi resiko - evaluasi SPIP - | 60% | - Mengisi kuisener LKE - Penetapan identifikasi resiko - evaluasi SPIP - | 80% | - Mengisi kuisener LKE - Penetapan identifikasi resiko - evaluasi SPIP - Penilaian | 100% | - Mengisi kuisener LKE - Penetapan identifikasi resiko - evaluasi SPIP - Penilaian |
| 10 | Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel | Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabel | min 78 | 100% | - Persiapan penilaian | 100% | - Penilaian SAKIP | 100% | - Hasil Penilaian SAKIP | 100% | - Hasil Penilaian SAKIP | 100% | - Hasil Penilaian SAKIP |